EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SOKI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA

SKRIPSI

Oleh :

Nofiratullah

NIM. 14130051

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

JURUSAN PENDIDIKAN PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Mei, 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SOKI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri untuk Memenuhi Salah-satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana

Pendidikan (S.Pd)

Oleh :

Nofiratullah

NIM. 14130051

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

JURUSAN PENDIDIKAN PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Mei,2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSERTUJUAN

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM *MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA SOKI KECAMATAN BELO* KABUPATEN BIMA

SKRIPSI

Oleh
Nofiratullah
NIM.14130051

Telah Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

Ni'matuz Zuhroh, M.Si
NIP. 197312122006042001

Tanggal, 21 Mei 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr.Alfiana Yuli Efianti, MA
NIP. 19710701 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SOKI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Nofiratullah (14130051)
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 6 Juni 2018 dan dinyatakan
LULUS
Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian		Tanda Tangan
Ketua Sidang Luthfiya Fathi Pusposari, SE 19810719 200801 2 008	:	
Sekretaris Sidang N'matuz Zuhroh, M.Si 1973121 2200604 2 001	:	
Pembimbing N'matuz Zuhroh, M.Si 1973121 2200604 2 001	:	
Penguji Utama Dr. Alfiana Yuli Efianti, MA 19710701 200604 2 001	:	

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Maik Ibrahim Malang

Dr. H. Agus Maemun, M.Pd
NIP. 19650817 199803 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibuku (Asmah) dan Kakakku (Nurfitriani) Serta adik-adikku : Riko Nuralim Zikrullah, Muammar Rizki dan Nursanti yang telah membantu saya dengan sepenuh hati dari segi materi maupu non materi .

Saya mengucapkan terima kasih kepada Nenek, Paman, Bibi, Sepupu dan para Sahabat yang sudah mendo'akan, mendukung dan membantu saya selama ini.

Terima kasih kepada kakak Kholqin jadin yang motivasi untuk terus berjuang hingga meraih prestasi dan terus memperbaiki setiap langkah ini.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru saya mulai dari guru SDN Inpres 2 Ngali, SMP Negeri 1 Belo, MAN 1 Kota Bima, dan Dosen FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada saya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Pemerintah Desa Soki Dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) AINA NEFA di Desa Soki, dan teman-teman seperjuangan P.IPS UIN Maliki Malang 2014.

Kepada Kelompok PKL 61, Kelompok KKM 70, dan PKM yang saya sayangi.

Kepada para sahabat di perkuliahan, Ema Yusrinah Fahmidah, Linda Anggita , Atikah Zakiyatul Fikriyah, Dini Amalina, Hofsatul Mutmainnah, Khoirul Khusnadah, Fifi Astuti, yang telah mendukung saya dan memberikan semangat kepada saya.

Kepada Ustadz Handoko, Ustadz Husni Mubarok, Ustadz Lutfi, Ustadz Kadarisman, Ustadz Mugis, Ustadz Aziz, Ustadz Khoir, Ustadzah Nafisa, Ustadzah Halimah, Ustadzah Khilfa, dan Ustadzah Lucky.

Serta kepada Ustadz/ah dan teman-teman asrama GTM (Lailis, Feny, Nia, Esa, Anik, Linda, Ustadzah Fitri, Mbak Siti, Rima, Vivin, Selda, Muhim, Lilin, Vicky, Puput, Niswah, Ira, Vivi, Halimah, Ipeh, Dini, Yunita, Mbak Halimah, Bu Insi).

Teman-teman organisasi di HMI, HMB, REMAN, dan LKP2M

Anak-anak di LPQ Wardatul Islah dan adik-adik MTS NU TMI PUJON di Pujon, terima kasih karena saya bisa belajar dari kalian dan membuat saya terus belajar luas ilmu pengetahuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain"

(HR.Bukhari Muslim)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ni'matuz Zuhroh, M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Nofiratullah Malang, 21Mei 2018

Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang.

di

Malang

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Sesudah melakukan penelitian beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nofiratullah

NIM : 14130051

Jurusan : Pendidikan IPS

Judul Skripsi : Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diajukan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Pembimbing,

Ni'matuz Zuhroh , M. Si
NIP. 197312122006042001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakanbahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 21Mei 2018
Yang membuat pernyataan,

Nofiratullah
NIM.14130051

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, penulis memajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pencipta alam semesta dan sekaligus pengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang diharapkan.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari jalan yang bathil menuju jalan yang haq dan terang benderang ini, yakni Ad-Dinul Islam.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya do’a, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Asmah, kakak Nurfitriani dan Riko Nuralim Zikrullah, Muammar Rizki, Nursanti adik-adik tercinta yang tak pernah berhenti berdo’a demi sesuatu yang terbaik untuk penulis dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. IbuDr. Alfiana Yuli Efianti, MA Ketua Jurusan IPS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. IbuNi’matuz Zuhroh, M,Pd selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Bapak Abas Muhamad selaku Kepala Desa Soki yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Segenap Pengurus BUMDes AINA NEFA, Pengurus Desa Soki,dan seluruh masyarakat Desa Soki yang telah memberikan waktunya selama penelitian skripsi.
8. Ustadz/ah serta teman di Asrama GTM tercinta yang tak pernah berhenti memberikan do'a dan semangat selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya P.IPS Angkatan 2014
10. Semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baiknya pada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik untuk selanjutnya.

Akhirnya,harapan saya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.*Amin Yaa Robbal 'Alamin*

Malang, 21 Mei 2018

Penulis

Nofiratullah

NIM. 14130051

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Huruf

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dh	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

وْأَ= aw

يْأَ= ay

وْأُ= û

يْإِ= î

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

TABEL I : Penelitian Terdahulu 10

TABEL II : Perencanaan Pembangunan Daerah 38

TABEL III : Pendekatan Dan Konsep Baru Dalam Pembangunan 48

TABEL IV : Narasumber 58

TABEL V : Population And Population Growth Rate Subdistrict In Bima Regency, 2010, 2014, And 2015 64

TABEL VI : Jumlah Kependudukan 77

TABEL VII : Jumlah Keluarga 77

TABEL VIII : Tingkat Pendidikan 77

TABEL IX : Kesejahteraan Keluarga 78

TABEL X : Pembagian Wilayah Administrasi Desa Soki 78

TABEL XI : Pekerjaan 90

TABEL XII : Profil BUMDes 92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I : Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 22

GAMBAR II : Penetapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2020 40

GAMBAR III : Program Pembangunan Masyarakat 46

GAMBAR IV : Kerangka Berpikir 52

GAMBAR V : Analisis Data 59

GAMBAR V : Peta Administrasi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat 66

GAMBAR VII : Peta Sebaran Satuan Pendidikan 67

GAMBAR VIII : Peta Desa Ngali 74

GAMBAR IX : Struktur Organisasi Pemerintah Desa 79

GAMBAR X : Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Aina Nefa 99

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Tarbiyah

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Desa

Lampiran III : Bukti Konsultasi

Lampiram IV : Pedoman Wawancara

Lampiran V : Hasil Wawancara

Lampiran VI : Dokumentasi

Lampiran VII : Biodata

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN PESEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **vii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Originalitas Penelitian 8

F. Definisi Istilah 10

G. Sistematika Pembahasan 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Landasan Teori 13

1. Eksistensi 13

2. Pemerintahan Desa 14

3. Otonomi Desa 24

4. Badan usaha Milik Desa 25

B. Pembangunan 36

C. Kerangka Berpikir 50

BAB III METODE PENELITIAN **53**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 53

B. Kehadiran Peneliti 54

C. Lokasi Penelitian 55

D. Data dan Sumber Data 56

E. Teknik Pengumpulan Data 57

F. Analisis Data 58

G. Prosedur Penelitian 61

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 63

A. PAPARAN DATA 63

1. Deskripsi Objek Penelitian 63

2. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 88

3. Gambaran umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 92

4. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonimian 99

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V PEMBAHASAN **106**

A. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki 106

B. Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki 118

BAB VI PENUTUP **120**

A. Kesimpulan 120

B. Saran 121

DAFTAR RUJUKAN 123

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Ratullah, Nofi. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi:
Ni'matuz Zuhroh, M.Si

Salah-satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social instution)* dan komersil (*commercial instution*). Berararti BUMDes merupakan lembaga yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan utama dari BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, (2) mendeskripsikan problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus yang dilaksanakan selama dua siklus pertemuan. Instrumen kunci adalah kehadiran peneliti/peneliti sendiri, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen/data, dan foto. Data dianalisis dengan mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki kecamatan Belo kabupaten Bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, (2) Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki Kecamatan Belo kabupaten Bima salah-satunya kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDes ini secara kualitas masih sangat kurang dan kurang sosialisasi BUMDes ini baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDes mengenai keradaan BUMDes.

Kata Kunci: Eksistensi, BUMDes, Perekonomian, Masyarakat, Desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Ratullah, Nofi. 2018. Existence of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Improving the Economics of Soki Village Belo District Bima District. Thesis, Social Sciences Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ni'matuz Zuhroh, M.Si

---

One of the institutions that will build and sustain the economy of village communities is the Village Owned Enterprise (BUMDes). BUMDes is an economic pillar in the village that serves as a social institution (*social instution*) and commercial (*commercial instution*). Mean BUMDes is an institution that prioritizes the interests of the community through participation in the provision of social services of village communities. The main purpose of BUMDes is to improve the welfare of rural communities

The Purpose of this research are: (1) to describe the implementation of BUMDes in improving the community economy in Soki Village Belo Sub-district, Bima Regency, (2) to describe the problem of BUMDes in improving economy in Soki Village, Belo District Bima.

To achieve the above objectives, a qualitative approach with a case study approach was adopted during the two cycles of meetings. The key instrument is the presence of researchers/researchers themselves, data collection techniques used are observation, interviews, documents/data, and photos. Data were analyzed by reducing irrelevant data, exposing data to draw conclusions.

The result of the research indicates that (1) the existence of BUMDes in improving the community economy in Soki village Belo sub-district Bima continued to increase in terms of income and in terms of management BUMDes so as to improve the welfare of the community, (2) Problem of Owned Enterprises Village (BUMDes) in improving the community economy in the village of Soki Belo District Bima district is the only lack of human resources available in the management of this BUMDes quality is still very lacking and lack of socialization BUMDes both village and BUMDes management of BUMDes.

Keywords: Existence, BUMDes, Economy, Society, Village

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

راتوللهّ، نوفي.2018 . وجود قرية الشركات المملوكة (قرية الشركات المملوكة)في زيادة الإقتصاد المجتمع قرية سوكي النواحي بيلو المناطق بيما. البحث الجامعي، قسم التعليم العلوم الإجتماعية، كلية العلوم التربية و التعليم، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف: نعمة الزهرة، الماجستيرة.

إحدى من المؤسسات التي من شأنها بناء و تحمل الإقتصاد المجتمع القرية هي قرية الشركات المملوكة (قرية الشركات المملوكة). قرية الشركات المملوكة هي عمود الإقتصادية في القرية يقدم كمؤسسة إجتماعي (*مؤسسة إجتماعي*) و تجاري (*مؤسسة تجاري*). عني قرية الشركات المملوكة هي المؤسسة الأولوية مصالح المجتمع من خلال المشاركة في مقدمي جمعية الخدمات الإجتماعية في القرية. والغرض الرعسي من قرية الشركات المملوكة هي زيادة الرفاهية المجتمع القرية.

هذا هدف البحث هو: (1) وصف تطبيق قرية الشركات المملوكة (قرية الشركات المملوكة)في زيادة الإقتصاد المجتمع قرية سوكي النواحي بيلو المناطق بيما. (2) وصف مشكلة قرية الشركات المملوكة في زيادة الإقتصاد المجتمع قرية سوكي النواحي بيلو المناطق بيما.

لتحقيق الهدف، صالحة للإستعمال نهج نوعي المباني نوع نهج حالة نفذت خلال دورتين الإجتماع. أداة رئيسية هي بحضور الباحثين أنفسهم، تقنيات جمع البيانات مستعمل هو مراقبة، مقابلة، وثيقة/بيانات و صورة تحليل البيانات عن طريقة الحد من البيانات التي ليست ذات الصلة، يلقي ضوءا البيانات يستنتج.

حصل البحث تبين أن، (1) . وجود قرية الشركات المملوكة (قرية الشركات المملوكة)في زيادة الإقتصاد المجتمع قرية سوكي النواحي بيلو المناطق بيما تستمر التجربة زيادة من حيث الإيريدات ولا من حيث الإدارة قرية الشركات المملوكة حتى زيادة الرفاهية المجتمعها، (2) مشكلة قرية الشركات المملوكة (*قرية الشركات المملوكة*) في زيادة الإقتصاد المجتمع قرية سوكي النواحي بيلو المناطق بيما إحدى و الافتقار إلى الموارد البشرية أن هناك في الادارة هذا قرية الشركات المملوكة في الجودة لا يزال أقل جدا و عدم التنشعة الاجتماعية من قرية و المجلس قرية الشركات المملوكة بخصوص حالة قرية الشركات المملوكة.

الكلمات الرئيسة : وجود، قرية الشركات المملوكة، الإقتصاد، المجتمع، قرية.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.[1]

Untuk menuju pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengelola daerah sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan di berbagai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya. Apalagi di era modern, memberikakan peluang besar untuk setiap daerah yang terus berkembang dan memajukan daerahnya sendiri. Perkembangan perekonomian merupakan salah-satu penopang suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Maka pemerintah harus dapat menggali, mengolah dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah tersebut.

[1]Hamiati dan Abdul Aziz Zulhakim, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi* ASEAN, Artikel, UniHaz Bengkulu. 2017. Hlm. 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bukan saja daerah yang berdiri sendiri, tapi desa mempunyai otonom asli yang bisa mengelola, menjalankan, serta melaksanakan hak dan wewenang untuk mengembangkan potensi dan kualitas masyarakat yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Segala potensi yang ada di desa dapat di kelola mulai dari sumber daya alam (tumbuhan, air, hewan, batu, minyak bumi) sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha (modal). Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu dan membina dalam pelaksanaannya.

Dinamika Perdesaan di Indonesia telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan. Yayasan Penabalu Saemaul *Globalization Fondatin* (SGF) memiliki impian yang sama besar dengan desa-desa di Indonesia. Kesamaan visi pada pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan di harapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintah masyarakat desa.[2]

Sehingga desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pengarahan, pengelolaan akan pengembangan maupun bantuan modal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah akan memberikan modal sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 untuk

[2]Gabriela Hanny Kususma dan Nurul Purnamasari. 2016. *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan.* Jogjakarta; Penabulu Fundation. Hlm. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang ada sesuaikan dengan kondisi desa sehingga mampu mengatasi masalahnya.

Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam koteks demokrasi lokal.[3]

Tidak jarang orang menganggap desa adalah tempat kumuh yang tidak memiliki potensi yang bisa di andalkan. Pada hal, dari desalah langkah awal untuk membangun perekonomian masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2016 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut adalah langkah nyata untuk mendorong serta mambangun masyarakat atau mensejahterakannya rakyat dan mengasah potensi sumber daya sesuai dengan kebutuhannya. Serta memperluas jaringan dengan menjalin kerjasama antar desa yang menghasilkan produk-produk yang berkaulitas tinggi.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[4]

---

[3]Gabriela Hanny Kususma dan Nurul Purnamasari. 2016. *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan.* Jogjakarta; Penabulu Fundation. Hlm. 2
[4]Ibid. Hlm. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai pemerintah desa yang memiliki otonom penuh, untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka desa harus bisa mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang sesuai potensi desa tersebut. Desa bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat dengan steakholder bisa saling bekerja untuk saling membangun desa misalnya dengan meningkatkan mutu pertanian, meningkatkan kualitas air bersih, meningkat dunia usaha/ bisnis sesuai potensi desa, membangun koperasi sejahtera dan sebagainya. Dengan demikian, desa tidak akan mengantungkan harapan terhadap pemerintah akan tetapi desa bisa berkembang sendiri. Meskipun ada dana (modal) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa akan mendapat bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta sampai 1,2 Milyar tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak hanya mengantungkan pendapatnya dari bantuan pemerintah tersebut.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 masyarakat desa tidak mendapat bantaun/alokasi dana untuk membangun usaha-usaha yang ada desa tersebut. Sehingga masyarakat desa harus bekerja kerja dan berpikir keras untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal. Maka dari sinilah, desa harus mampu mengali sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang ada di desa tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengembangan basis ekonomi di pendesaan sudah semenjak lama di jalan pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membualkan hasil yang memuaskan sebagaimana di inginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah-satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pendesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.[5]

Pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tidak saja memberi modal, akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat desa yang lebih mandiri dan produktif. Begitu pula, dengan masyarakat desa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga pada realitanya masalah yang ada di desa teratasi.

Salah-satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bumdes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social instution*) dan komersil (*commercial instution*).[6] Berarti Bumdes adalah lembaga yang memprioritas kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan

[5]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 1
[6]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelanayanan sosial masyarakat desa. Tujuan utama dari Bumdes adalah meningkatkan kesejateraan masyarakat desa.

Dalam sumber meningkatkan Pendapatan Desa harus dikelola dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Karena dari pemerintahlah sebagian besar modal atau bantuan yang ada di desa, batuan pemerintahh sekitar 51% dan desa 49% .[7] Berarti kita bisa melihat, desa masih sangat membutuhkan bantuan steakholder-steakholder. Desa memang daerah otonom yang kecil sehingga pendapatan asli desa tidak akan mampu membangun desa baik dari segi infrastruktur dan administrasi. Sehinnga perlu pengelolaan yang baik dari segi manajemen sehingga pendapatan asli desa (PADEs) dan keuangan desa dapat memiliki PADEs yang maksimal untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat desa yang memadai.

Tidak saja itu, karena meningkatnya PADEs akan mengurangi terjadi kesenjangan sosial yang kadang sering terjadi di desa. Karena banyak masyarakat yang tidak mampu dan tidak bekerja akan memicu terjadi penyimpangan yang tidak inginkan di masyarakat.

Untuk mencapai kondisi tersebut langkah strategis dan taktis guna mengintegrasi potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Di samping itu, di perlukan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengelimir rendah surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak

[7]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkembangnya sektor ekonomi di wilayah perdesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat di jadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga. [8]

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus masalah yang dapat dijadikan penelitian adalah :

1. Bagaimana eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima ?
2. Bagaimana problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima
2. Untuk mendeskripsikan problem Badan Usaha Mliki Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima

[8]Ibid Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pendidikan di luar sekolah khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

   b. Bagi penulis sendiri menambah pengetahuan tentang penting lembaga ekonomi melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Dapat meningkatkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau refrensi penelitian yang akan datang.

   b. Bagi Pemerintah

      Penelitiandapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini lakukan berdasarkan peneliti ingin mengetahui Eksistensi Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di Kecamatan Belo. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Soki terhadap masyarakat di sekitar daerah Kecamatan Belo terutama Desa Soki. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian yang dilakukan oleh Benny Ferdianto Mahasiswa Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung Bandar lampung dengan judul Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang dengan fokus penelitian Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentuk serta pengelolaan Artha Kencana.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yeni Fajarwati Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan fokus masalah implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Herlina Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinaju Menurut Ekonomi Islam dengan fokus masalah sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meringankan kehidupan masyarakat di Pekan Tua di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir Hilir.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Penelitian, Judul, Bentuk, (skripsi, thesis, jurnal,/dll) Penerbit, Tahun , Penelitian	Persamaan	perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Benny Ferdianto/Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat/skripsi/2016	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa	Bumdes Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa
2.	Yeni Fajarwati/Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Di Kecematan Pagedangan Kabupaten Tanggerang/skripsi/2016	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Implementasi Program Bumdes	Bumdes Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa
3.	Herlina/Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir) skripsi/2012	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Kontribusi Bumdes Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	Bumdes Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa

F. Definisi Istilah

1. Eksistensi adalah suatu keradaan. Keradaan yang dianggap yang dapat mengalami perkembangan atau kemajuan sehingga dapat di lihat wujudnya.

2. Dampak adalah pengaruh yang akan di lakukan Badan Usaha Milik Desa sehinggga mengalami perubahan yang membawa kemajuan untuk sebuah desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Desa adalah suatu masyarakat yang mempunyai wewenang atau haknya sendiri serta mempunyai otonom asli sehingga bisa mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri dengan mengolah potensi desa sesuai kebutuhan.
4. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha milik desa yang di bangun dan di kelola oleh masyarakat desa itu sendiri, sehingga potensi maupun kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut bisa dilestarikan dan hasilnya akan di kembalikan di masyarakat desa tersebut.
5. Perekonomian adalah salah-satu sistem yang akan mengatur sumber daya yang ada dalam sebuah desa sehingga dapat dikelola potensi yang di desa tersebut.
6. Masyarakat adalah yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi untuk saling berkomunikasi dan membentuk sebuah kelompok untuk bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam masyarakat desa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menguraikan penelitian ini secara runtut dan memperoleh pembahasan yang jelas, maka pembahasan diatur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi Istilah, Sistematika Pembahasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang kajian kepustakaan (makro) dan (mikro) berupa landasasan teoritis yang berhubungan dengan *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Tehnik Pengempulan Data, Analisis Data, Prosedur Penelitian, Pustaka Sementara.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan, deskripsi data (disesuaikan dengan Fokus Masalah) dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan di hasil penelitian dan saran rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.[9]Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat inherennya).[10]

Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007) eksistensi adalah : "Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran,tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya".

[9]Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB).
[10]Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hlm. 183

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari penegertian dan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa eksistensi adalah suatu keberadaan yang akan membawa sebuah perubahan yang telah ada, sehingga muncul hal-hal yang terus bergerak ke arah lebih berkualitas.

2. **Pemerintah Desa**

a. Pengertian Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[11]

Menurut Ndraha bahwa desa yang otonomi adalah desa-desa yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

Mengambil keputusan atau membuat yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.

[11]Emi Haryati, "*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*", ejornal Ilmu Pmerintah, 3 (4) 2015: 1914-1927, hlm 3-4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Menjalankan pemerintah desa.
2) Memilih kepala desa.
3) Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
4) Memiliki tanah sendiri.
5) Menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan desa.
6) Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran desa.
7) Menyelenggarakan gotong-royong.
8) Menyelenggarakan perdilan desa.
9) Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan desa.[12]

Pengaturan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan asas-asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal itu tercantum dalam pasal (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas pengaturan desa pasal (3) dan pengertiannya yaitu :

a) Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal-usul
b) Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masarakat desa.
c) Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[12]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.

e) Kegotong-royongan adalah kebiasaan untuk tolongmenolong untuk membangun desa.

f) Kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

g) Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

h) Demokrasi adalah system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui , ditata, dan dijamin.

i) Kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

j) Partisipasi adalah turut berperan aktif dalan suatu kegiatan.

k) Kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

l) Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

m) Keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.[13]

Desa merupakan bisa jadi awal permulaan dalam pembangunan daerah yang mempunyai potensi tersendiri yang dapat di gali serta di kembangkan sehingga desa tidak di anggap sebagai tempat yang terbelakang, terpencil, tertinggal, dan kumuh. Tidak sedikit desa yang mempunyai sumber daya alam yang berkualitas yang dapat di jadikan sumber pendapatan desa.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut sumber Saparin (2009) dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa" menyatakan bahwa : Pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan".[14]

Pemerintahan desamenurut Momon Soetusna Sendjaja dan Sjachran Basan (2002), yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa pemerintah desa

[13] Afriniko. *Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal. JOM Fakultass Hukum. Pekanbaru. 2015. Hlm. 9-10
[14]Suhana, *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penyelanggaraan Pemerintah*, Artikel E-Journal, TanjungPinang. 2014, Hlm. 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15]

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa yang berdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan desa. Perangkap desa terdiri dari sekretaris desa (SEKDES) dalam perangkap desa lainnya.[16]

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan pemerintahan desa yang mempunyai wewenang tersendiri dalam mengatur staekholder desa untuk segala pemerintah desa sehingga segala kepentingan masyarakat dan kemaslahatan masyarakat desa serta mensejahterakan masyarakat desa.

Ayat Al-Quran yang menjelaskan kesejahteraan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dalam segi politik, sosial, dan ekonomi. Salah-satu ayat kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا

Artinya : Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) pada manusia. (An-nisa 4: 53)

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

[15]Emi Haryati, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Bengkal Kecamatan Muara Kabupaten Kutai Timur*, Ejornal Ilmu Pemerintah, Fisip Unmul. 3 (4) 2015. Hlm. 8
[16]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Yunus 10:5)

Ayat Al-Quran yang menjelaskan kemanusiaan pemerintah bertanggung jawab atas perlingungan masyarakatnya. Pemerintah harus melindungi masyarakat sesuai ayat di bawah ini.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Ma'idah 5:32)

b. Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertanggung jawab dengan periodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.[17]

Alokasi dana desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendesa No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.[18]

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.[19]

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan

[17]Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). 2015. *Petunjuk Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Hlm. 33

[18] Masiyah Kholmi, "*Akuntabilitas Pengelolan Dana Alokasi Desa : Studi Kasus di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*", ejornal Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang. Vol. 07. No. 02 Bulan Juni 2016 Hal. 143-152.

[19]Okta Rosalinda LPD, *Pengeloalaan Dana Alokasi Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan*. Artikel jurnal. Universitas Brawijaya. 25 Juni 2014. Hlm. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.[20]

Dengan adanya dana alokasi desa pemerintah desa dapat bantuan modal dari staekholder untuk mendorong kegiatan dan program-program yang akan di selenggarakan oleh pemerintahan desa. Sehingga desa dapat membangun desa yang mandiri, kreatif, dan kuat. Dari sini, masyarakat tidak mengantung harapan kepada pemerintah di berbagai kebutuhannya.

Dimana pemerintah desa akan mengembangkan segala potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan dana ini, setidaknya meringan pemerintah dalam pembangunan usaha yang akan di mulai. Meskipun masih banyak problem dana alokasi desa (ADD) yang terjadi di berbagai daerah seluruh Indonesia.

[20]Okta Rosalinda LPD, *Pengeloalaan Dana Alokasi Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan*. Artikel jurnal. Universitas Brawijaya. 25 Juni 2014. Hlm. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : https://www.google.co.id/ siklus-pengelolaan-keuangan-desa.

c. Kelembagaan Desa

Lembaga atau *institution* merupakan wadah mengembangkan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan "lembaga desa" merupakan wadah untuk mengembangkan tugas dan fungsi pemerintahan desa (dimana tugas dan fungsi pemerintahan desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari wewenang desa) untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah (termasuk Pemerintah Desa) adalah pemberian pelayanan (*services*), pemberdayaan (*empowermwent*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya di abadikan bagi kepentingan masyarakat. .[21]

[21]Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Modul Pegangan Peserta Pelatihan Bagi Pelatih Manajemen Pemerintah Desa*. Hlm. 109

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jenis-jenis lembaga desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang ditindak lanjuti dengan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka terdapat 3 (tiga) lembaga desa yaitu: (a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); (b) Badan Permuswaratan Desa; dan (c) Lembaga Kemasyaratan.[22]

d. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah Peraturan Undang-undang yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepekati bersama BPD, yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa, peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dalam mengacu pada ketentuan peraaturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai pasal 2 Permendagri no 111/2014 bahwa jenis peraturan di desa:

a. Peraturan Desa,
b. Peraturan Bersama Kepala Desa, dan
c. Peraturan Kepala Desa.[23]

Peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama kepala desa. Perdes bersifat umum sehingga mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat semua orang yang berada dalam lingkup desa. Perdes harus mengindahkan batasan atau larangan

[22]Ibid, *Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Hlm. 110

[23]Direktoral Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Tanya Wajab Seputar Undang-Undang Tentang Desa. Jakarta Selatan; Kementrian Desa, Pembangunan Desa, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hlm. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang di tentukan oleh peraturan yang lebih tinggi derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.[24]

Menurut Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di lakukan oleh Kepala Desa yang di tuangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

1. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.[25]

Jualiantara (2003) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi diatasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.[26]

Kemudian ada beberapa unsur otonomi desa yang penting menurut Ndraha yaitu antara lain :

---

[24] Ibid. Hlm. 11
[25] Wayan Carwiaka, *Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. ejornal Ilmu Pemerintah, Fisip Unmul. 2013, 1(1). 123-134. Hlm. 4
[26] Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
b. Tanah pusaka dan kekayaan desa.
c. Sumber-sumber kekayaan desa.
d. Unsur-unsur rumah tangga.
e. Pemerintah desa memegang fungsi mengatur.
f. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.[27]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan otonomi desa adalah desa yang mempunyai wewenang tersendiri untuk mengatur, membangun, dan mengembangkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di desa, sehingga tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah memberikan modal dan membantu mengarahkan sesuai kebutuhan yang ada di desa tersebut.

Dari pemerintah desa tidak harus mengantungkan harapannya ke pemerintah pusat untuk segala keperluan maupun bantuan yang ada. Tapi desa harus bisa mandiri, kreatif, dan maju untuk mengelola sumber daya yang di desa tersebut.

1. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

[27]Emi Haryati, "*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*", ejornal Ilmu Pmerintah, 3 (4) 2015. Hlm 3-4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandangan ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan "*goowill*" dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan BUMDesdan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pendesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.[28]

BUMDes adalah lembaga desa yang di kelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang di Indonesia. Dengan BUMDes akan memberikan untuk masyarakat menggali, mengelola, dan mengembang potensi sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Serta mampu menjadi sentral kebutuhan

[28]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007.*Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat desa bahkan akan menjadi wadah buat desa lain untuk ikut berkembang.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMdes adalah :

1) Meningkatkan perekonomian desa,
2) Meningkatkan pendapatan asli desa,
3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pendesaan.[29]

Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang di kelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerak ekonomi desa. Lembaga ini juga di tuntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pendesaan di sebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.[30]

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

---

[29]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007.*Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 5

[30]Ibid. Hlm. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Kebutuhan masyarakat utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar,
3) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat,
4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalakan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenisnya lainnya,
2) Penyaluran sambilan bahan pokok ekonomi desa,
3) Perdangangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan agrobisnis,
4) Industri dan kerajinan tangan.

Keterlibatan pemerintahan desa sebagai penyerta modal besar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ke tiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.[31]

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

[31]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 5-6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan di kelola secara bersama,
2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil),
3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*),
4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar,
5) Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*),
6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes,
7) Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).[32]

BUMDes sebagai salah-satu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai peraturan perundang-undangan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Perararuran Desa (Perdes).[33]

c. Landasan Hukum BUMDes

Pendiri BUMDes di landasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah :

[32]Ibid. Hlm. 4-5
[33]Ibid. Hlm. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. **UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat (1)** "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. **PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:**

Pasal 78

a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus barbadan hukum.[34]

Pasal 79

a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa.
b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

(1) Pemerintahan desa,
(2) Tabungan masyarakat,
(3) Bantuan pemerintahan, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota,
(4) Pinjaman; dan/atau
(5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

[34]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(6) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat.[35]

Pasal 80

a. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.[36]

Pasal 81

a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan proposal Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

b. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

1. Bentuk Badan Hukum,
2. Kepengurusan,
3. Hak dan Kewajiban,
4. Permodalan,
5. Bagi hasil usaha atau keuntungan,
6. Kerjasama dengan pihak ketiga,
7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.[37]

[35]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 9-10

[36]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 10

[37]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d.Prinsip Tata Kelola

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

   a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karekteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

   b) BUMDes sebagai badan usaha yang di bangun atas insiatif masyarakat yang menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten dan pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundangan-undangan.

   c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, di realisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pendesaan, mengurangi praktek ijo (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cangkupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

e) Diprediksi bahwa karekteristik masyarakat desa yang perlu dapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mengcukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan pangan, sebagian besar memiliki matapencarian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal ini tidak mengcukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dan hasil kerja masyarakat desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

(1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.

(2) Memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.

(3) Meningkatakan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam malakukan penguatan ekonomi di desa.[38]

2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau di uraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal). BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat enam (6) prinsip dalam pengelola BUMDes yaitu:

a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

[38]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 11-12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat di ketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.[39]

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.[40]

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin semua kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi gaya gotong royong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.[41]

---

[39]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 13
[40]Ibid
[41]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Pembangunan

Menurut Adisasmita (2006) Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Tujuan pembangunan menurut Siagian (2005) yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarkat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sumpeno (2011) Sasaran (target) merupakan hasil yang diharapkan atas adanya suatu program atau keluaran yan diharapkan dari suatu kegiatan .[42]

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia.[43] Dalam *Economic Development in The Third World*, Todaro (2000) mengatakan:

> "Pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, dan serta kepercayaan".[44]

Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepas diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti

---

[42]Helmei Willy Amanda, *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Universitas Negeri Surabaya. Hlm. 3
[43]H. M. Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. Malang; Averroes Press. Hlm. 39
[44]Ibid. Hlm. 40

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memampukan dan memandirikan mereka. Dimulai proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memicu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.[45]

Cavage (n.d) mengatakan beberapa elemen dalam keberhasilan pengembangan masyarakat yaitu: kerja sama, kemauan, kepemimpinan, kerja keras dan organisasi yang terbina.[46] Faktor lain yang menentukan keberhasilan pemberdayaan adalah semangat dan kemampuan masyarakat. Karena pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, maka keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung respon, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat.[47]

Pembangunan desa adalah menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dapat di kelola dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakatnya, pemerintah dapat menunjang dengan memperbaiki sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga semua tatanan yang ada di pemerintah desa serta masyarakat akan berkontribusi untuk melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akan di laksanakan.

a. Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Kuncoro (2004), setidaknya ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika di kaitkan dengan hubungan pusat dan daerah:

---

[45]H. M. Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. Malang; Averroes Press. Hlm. 40

[46]Wignyo Adiyoso. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 25

[47]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara kedua dan konsekuensi tersebut.
2) Sesuatu yang tampak baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3) Perangkat kelembagaan yang bersedia untuk pengunaan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas, biasaya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan bersedia pada tingkat pusat. Perencanaan daerah yang efektif harus menggunakan berbagai sumber daya pembangunan yang sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi lengkap dan tersedia pada tingkat daerah pada tingkat daerah karena pendekatan dan para perencanaannya dengan objek perencanaan.

Tabel 2

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap	Tugas
I	Pengemupulan dan Analisis Data • Penentuan Basis Ekonomi • Analisis Strukutur Tenaga Kerja • Evaluasi Kubutuhan Pekerjaan Tenaga Kerja • Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan • Analisis Kapasitas Kelembagaan
II	Pemelihan Strategi Pembanguna Daerah • Penentuan Tujuan dan Kriteria • Penentuan Kemungkinan-Kemungkinan Tindakan • Penyusunan Target Strategi
III	Pemilihan Proyek-Proyek Pembangunan • Identifikasi Proyek Potensial • Penilaian Kelayakan Proyek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IV	Pembuatan Rencana Tindakan • Prapenilaian Hasil Proyek • Pengembangan Input Proyek • Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan • Identifikasi Struktur Proyek
V	Penenetuan Rincian Proyek • Pelaksanaan Studi Kelayakan Seraca Rinci • Penyiapan Rencana Bisnis (*Businees plan*) • Pengembangan, Pemantuan, dan Pengevaluasian program
VI	Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi • Penyiapan Skedul Implementasi Rencana proyek • Penyusunan Rencana Program Pembangunan secara keseluruhan • Targerting dan Marketing Aset-Aset Masyarakat • Pemasaran kebutuhan Keuangan

Sumber: Blakley. 1989 (Kuncoro, 2004)

Meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, kosekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil. Sebagai gambaran penetapan pembanguanan RPJNPN 2005-2025 dapat di lihat tabel berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2

Penetapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025

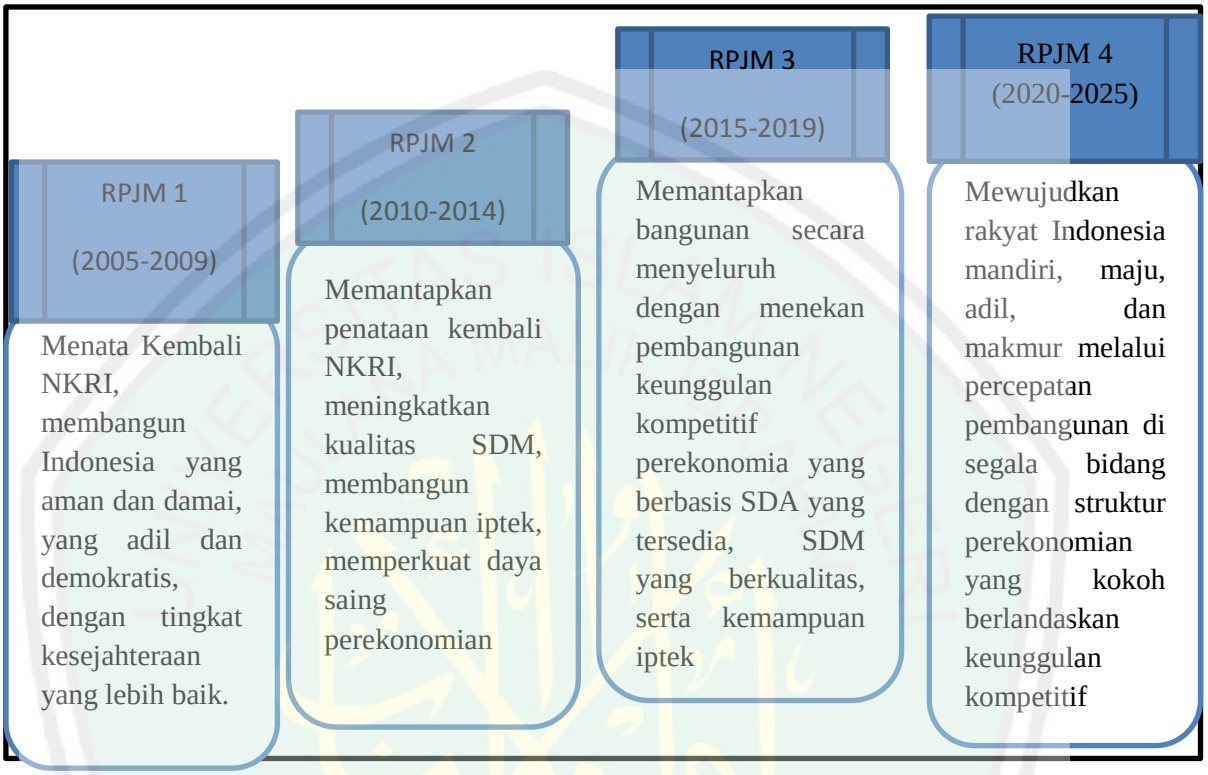

c. Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatulapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang di hadapi di tentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Dalam konteks inilah adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pentingnya merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat.[48]

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya pembangunan antar daerah dan kawasan. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut dilakukan melalui penempatan tata ruang yang bertujuan untuk mengembangkan pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan wawasan dan implementasikan melalui penetapan kawasan andalan.[49]

Menurut Kuncoro (2000) Kawasan adalah merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*Prime wover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.[50]

Pembangunan desa terpadu adalah suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari segi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecendrungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa.[51] Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut.[52]

---

[48]Ibid. Hlm. 72
[49]Ana Yulianita, *Analisis Sektor Keunggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.Jornal of Economic & Development*. Hal: 70-85
[50]Ibid
[51]Soetomo. 2006. *Pem bangunan Masyarakat*.Yogjakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 159
[52]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usaha pembangunan desa yang terutama bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan tersebut tidak jarang satu di pihak menampakkan keberhasilannya secara makro apabila dilihat dari seluruh desa, tetapi di lain pihak sering kurang menunjukkan aspek pemerataan, dalam artinya tidak semerata nya distribusi peningkatan pendapatan tersebut kepada lapisan-lapisan masyarakat yang ada.[53]

Memerhatikan perkembangan pendekatan pembangunan desa terpadu yang sudah diuraikan, dapat dilihat bahan integrasi dalam pendekatan ini di mulai dari berbagai aspek terkait dalam ruang lingkup yang lebih sempit, kemudian sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangannya dibutuhkan integrasi antar aspek-aspek terkait antar ruang lingkup yang lebih luas. Secara kronologis hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini:

1) Pada mulanya diawali dengan program pembangunan pertanian yang memperkenalkan berbagai ide baru dalam sistem usaha tani guna meningkatkan produktivitas per satuan luas.
2) Agar petani lebih responsif terhadap ide-ide baru yang diperkenalkan, maka penyuluhan pertanian perlu di integrasikan dengan program yang memberikan kemudahan memperoleh sarana produksi yang di perkenalkan, fasilitas kredit dan pemasaran.
3) Peningkatan produktivitas pertanian tidak selalu otomatis berarti peningkatan pendapatan rata-rata, apabila peningkatan produktiitas tersebut.

[53]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Akhirnya, agar lebih menjamin pemerataan dalam pendapatan sebagai manfaat yang diperoleh dari program tersebut, dibutuhkan integrasi antar berbagai aspek yang lebih luas.

Dengan strategi pembangunan desa terpadu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan hingga masyarakat mampu memperdaya potensi sumber daya desa, terutama dalam mengembangkan sektor pertanian karena aspek ini yang dapat mempengaruhi aspek lain. Karena dalam sistem pembangunan tidak hanya satu struktur saja yang akan membangun kemajuan suatu daerah tersebut.

c. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Percepatan pembangunan diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada satuan wilayah pengembangan. Pembangunan berbasis wilayah ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara wilayah, lebih dari itu pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran.[54]

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya danfasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas)

[54]Samugyo Ibnu Redjo, Strategi dan Aksi Pecepatan Pembangunan Daerah, hlm. 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakanmassif, maka merupakan hal yang sangat mungkinuntuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.[55]

Adisasmita (2006) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat 7 pendekatan dalam menggambarkan pembangunan desa, yaitu : *pertama,* Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa. *Kedua,* Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. *Ketiga,* Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks. *Keempat,* Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya. *Kelima,* Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambugan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komuikasi yang persuasif dan edukatif. *Keenam,* Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus. *Ketujuh,* Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan

[55]Gabriella Hanny Kusuma & Nurul Purnasari. *BUMDES: Kewirasusahaan Sosial yang Berkelanjutan. (*Yogjakarta: Yayasan Penabalu, 2016). Hlm. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.[56]

Salah-satu elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak saja menjadi instrumen dan tujuan, namun juga menjadi roh program-program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dalam konteks pengembangan kapasitas, menurut Plummer (2000), selain dapat memberikan manfaat prasarana dan sarana, juga ada jaminan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan partisipasi, infrastruktur yang dibangun, maka kualitas dan rasa kepemilikan dan pemeliharaan dapat dijamin.[57]

Secara umum strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini mengantisipasi kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.[58]

Teori pertumbuhan ekonomi adalah tata cara untuk menentukan jumlah rata-rata pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk sebuah negara dalam jangka waktu tertentu.[59]

---

[56]Helmei Willy Amanda, *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Universitas Negeri Surabaya. Hlm. 3
[57]Wignyo Adiyoso. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 5
[58]Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. (Jakarta; PT Pustka LP3ES Indonesia, 1994). Hlm. 122
[59] H. M. Safi'i. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. (Malang; Averroes Press, 2007). Hlm. 48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbagai upaya pembangunan masyarakat di negara-negara sedang berkembang lebih ditandai dengan adanya keragaman ketimbang seragam. Keragaman atau diversitas ini nampak sekali meski pada istilah-istilah yang gunakan. Istilah semacam pembangunan masyarakat (*community development*, pembangunan sosial (*social development*), pembangunan pendesaan *(rural development*) digunakan di berbagai negara dengan definisi dan konotasi yang berbeda-beda.

GAMBAR 3

Program Pembangunan Masyarakat

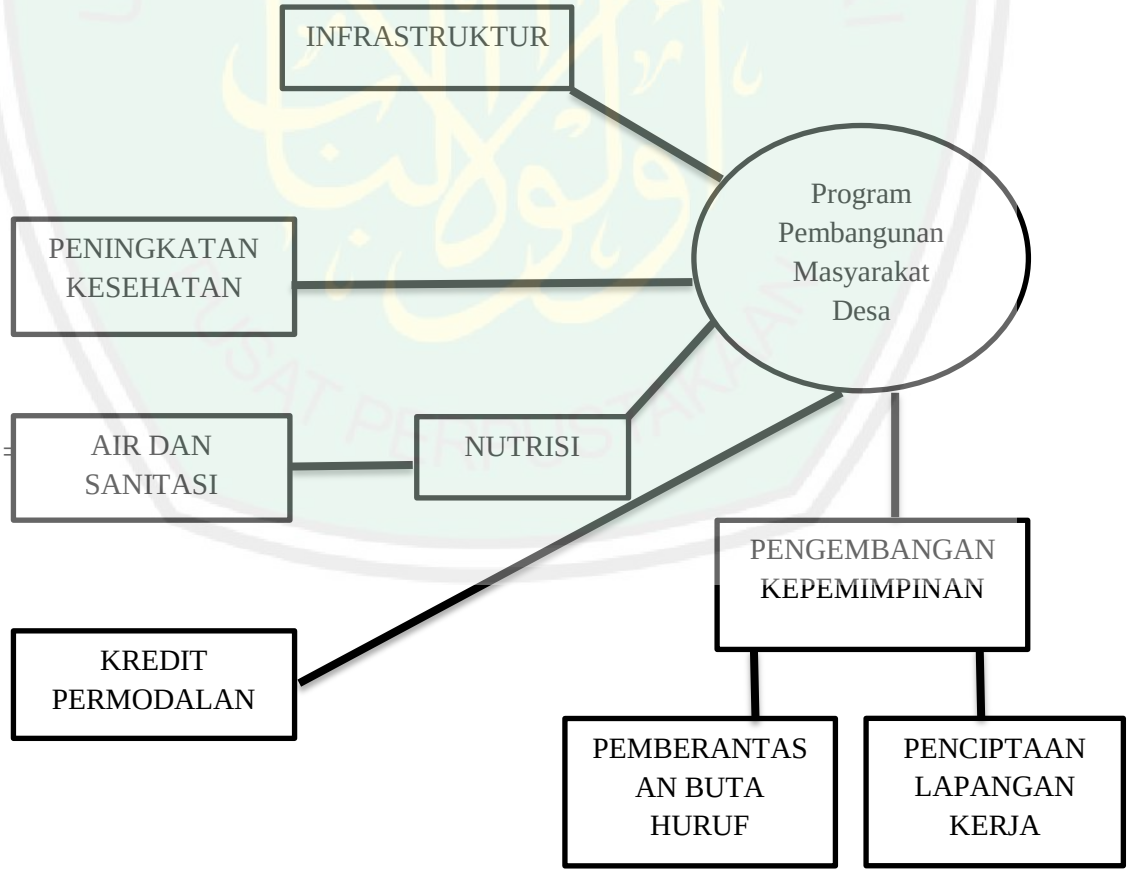

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bila sejumlah program pembangunan masyarakat sedang berkembang merupakan program satu fokus, sebagian program lainnya memiliki sejumlah fokus. Yang cukup menarik, sebagian besar program satu fokus berusaha sebanyak mungkin tujuan. Dengan munculnya pendekatan holistik dalam pembangunan, banyak program pembangunan telah bergerak menuju sebuah model terpadu (*integrated model*).

Menyikapi sejumlah kekurangan paradigma pembanguan pedesaan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, muncullah sebuah paradigma pembangunan pedesaan terpadu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil rata-rata daerah di Indonesia sejauh ini belum tercapai dan memuaskan.[60] Hal ini terjadi karena masyarakat secara umum masih berada dalam kondisi kemiskinan dan masalah identifikasi atas kebutuhan dirinya yang belum maksimal. [61] Asumsi yang melatarbelakangi konsep pertumbuhan ekonomi adalah bahwa dengan tingginya tingkat pertumbuhan maka akan segera didapatkan capaian pemerataan pendapatan. Artinya, pembangunan ekonomi harus terlebih dahulu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, baru kemudian pemerataan ekonomi yang tampak.[62]

Masalah kemiskinan masih menjadi masalah utama. Kemiskisnan menjadi alasan rendahnya *Human Develovment Index* (HDI), Indeks pembangunan manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih

[60]H. M. Safi'i. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. (Malang; Averroes Press, 2007). Hlm. 48
[61] Ibid. Hlm. 49
[62] Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara di dunia. Misalnya pada *Human Development Report* 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka *Human Development Index* (HDI) Indonesia adalah 0,692.[63]

d. Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Koncoro (2004), teori pembangunan yang ada selama ini memang yang belum berhasil mengupas secara tuntas mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang di daerah. Karena itulah sangat penting untuk melakukan perumusan ulang paradigma baru perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih komprehensif. [64]

Dalam berbagai pandangan yang ada terdapat beberapa perbedaan antara konsep lama dan baru tentang pembangunan. Mengikuti identifikasi yang dilakukan Koncoro (2004), yang dapat digunakan penerapan di daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan evaluasi atau penilaian pembangunan ekonomi daerah yang terjadi saat ini, maka di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3

Pendekatan dan Konsep Baru dalam Pembangunan

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak kesempatan kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-ast Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas

[63] Ibid. Hlm. 53
[64] H. M. Safi'i. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. (Malang; Averroes Press, 2007). Hlm. 53

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		lingkungan
Sumberdaya Pembangunan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan dan inovasi sebagai pengerak ekonomi

Sumber: Koncoro, 2004

Dari pemetaan tersebut dapat dipahami paradigma baru pembangunan ekonomi di daerah sangat mengandalkan pada adanya potensi penduduk setempat sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya perusahaan yang berdiri, tetapi seberapa besar angkatan kerja di lingkungan sekitar yang berhasil diserap oleh kegiatan pembangunan. Selain itu pertimbangan keberhasilan bukan terletak pada seberapa banyak aset fisik yang dimiliki melainkan pada kualitas lingkungan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[65]

Salah-satu pokok yang harus diperhatikan dalam rangka menerapkan paradigma pembangunan ekonomi daerah yang lebih komprehensif ini adalah bagaimana proses identifikasi fundamental ekonomi secara lebih realistik.[66]Sedangkan pokok yang harus diperhatikan untuk menyusun identifikasi fundamental ekonomi pembangunan daerah tersebut adalah: (a) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah; (b) Peningkatan pendapatan per kapita; (c) Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan secara signifikan.[67]

Dalam membahas kemiskinan, penelitian dari Subagio (2004) dengan topik *Help the Poor Help Themselves* menegaskan bahwa kemiskinan ekonomi

[65]H. M. Safi'i. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. (Malang; Averroes Press, 2007). Hlm. 57
[66] Ibid
[67] Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jelas keberadaannya. Namun kemiskinan bagaimanapun, tidak hanya dipahami dengan terminologi ekonomi saja. Kemiskinan pada pokoknya multi-dimensional. Kemiskinan ekonomi akan susah diatasi kalau terintegrasi dengan kemiskinan secara politis atau yang di akibatkan secara struktural. Penelitian Subagio (2004) ini akan memberikan landasan bagi pembangunan di daerah terutama tentang potret kemisnikinan dan cara-cara mengatasinya.[68]

Dalam hal ini pemerintah daerah bisa bertindak sebagai koordinator dalam rangka menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi baru bagi pembangunan ekonomi didaerahnya. Peran dan koordinasi yang memiliki pemerintah daerah ini bisa dilakukan dengan mengajak keterlibatan kelompok-kelompok di luar pemerintah dalam rangka menyerap, mengumpulkan serta menganalisis informasi yang hendak di jadikan landasan kebijakan.[69]

Adanya kerjasama yang harmonis di antara kelompok pemerintah dan masyarakat serta kelompok lain di luar pemerintah merupakan faktor mendasar untuk mencapai kebijakan pembangunan yang realistis dan lebih di butuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini partisipasi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kebijakan pembangunan yang signifikan.[70]

e. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Perkembangan BUMDes di desa ini, tahun demi tahun mengalami kemajuan, dari

[68]Ibid
[69]H. M. Safi'i. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif teoritik*. (Malang; Averroes Press, 2007). Hlm. 58
[70]Ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekian desa yang berada di Kecamatan Belo hanya di desa Soki lah Bumdes yang aktif dan terus mengalami kemajuan. Sesuai amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014, bahwa desa mempunyai otonom yang berdiri sendiri untuk menjalan pemerintahnnya sesuai kebutuhan dan potensi desa tersebut. Dengan banyaknya desa yang terus berkembang butuh lindungi dan diperdayakan sehingga mempunyai tujuan yang semakin jelas seperti mengalami kemajuan, kemandirian, dan domekratis. Sebelum adanya UU No.6 Tahun 2014 maupun negara Indonesia desa telah ada sejak dulu.

Dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 desa memiliki naungan yang jelas, sehinnga segala pemerintah desa dan masyarakat desa akan bersatu. Pemerintah disini bertindak untuk membimbing, mengarahkan dan mengayomi masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa berperan aktif dalam perubahan-perubahan dalam pembangunan desa serta berpatisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4

Kerangka Berpikir

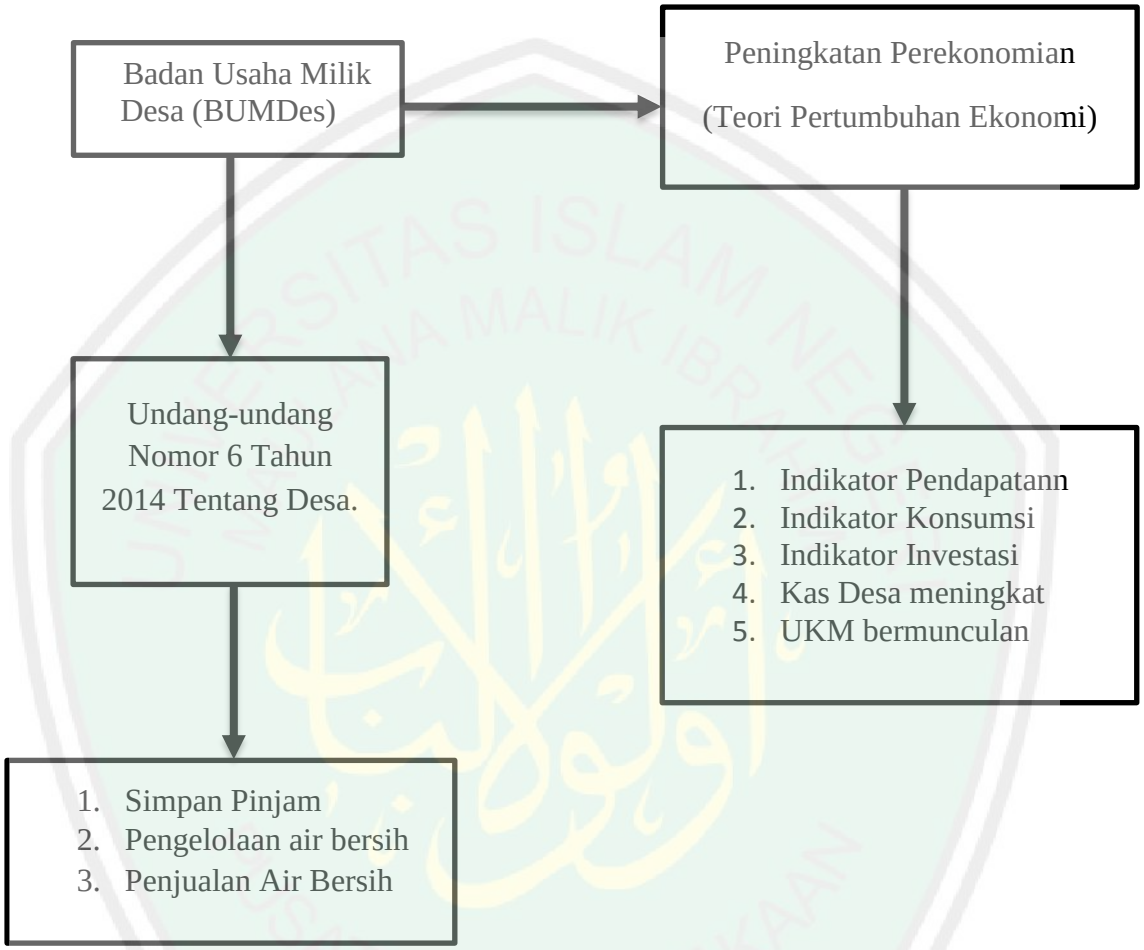

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kelola pemerintah desa Soki. Khusus pemerintah desa Soki dan masyarakat di kecamatan Belo. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen merupakan penelitian penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari anggota atau perilaku yang diamati.[71]Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya suatu fakta, walaupun terkadang ditambah atau dianalisis.[72]

Data terkumpul selama dianalisis selama proses penelitian. Dengan mempertimbangkan cara pengumpulan data, dimana peneliti harus terlibat langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dari informan dan analisis data yang terkumpul selama proses data penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) Penelitian kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[73] Jenis pendekatannya adalah studi kasus sebagaimana di ungkapkan

[71] Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 3
[72] Pabundu Tika.*Metodologi Penelitian Geografi*. Jakarta : Bumi Aksara.2005. Hlm.4
[73]Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh Basuki (2006) studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal.[74] Dalam penelitian Kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.[75] Studi kasus yang selama ini dikerjakan berkisar pada keputusan-keputusan, program-program, proses implementasi, dan perubahan organisasi.[76]Rancangan studi kasus untuk menganalisis bagaimana implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perekonomian masyarakat, bagaimana problem BUMDes dalam mengatasi masalah yang ada.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument dan pengumpul data. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggali makna dari subyek yang diteliti dengan kondisi alamiah melalui penggalian data di lapangan yang didasarkan empati, hanya manusia yang mampu melakukannya dengan tepat, benar dan akurat.[77]

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang di manfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perasaan, dan perilaku individu atau kelompok.[78]

Kehadiran peneliti sangat signifikan dalam melakukan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sebagai instrumen utama

---

[74]. Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hl Hlm. 129
[75] Ibid. Hlm. 5
[76]Robert K.Yin. 2014. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 31
[77] Nusa Putra.*Penelitian Kualitatif IPS.*Bandung.PT Remaja Rosdakarya.2013.Hal 92
[78] Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk memperoleh informasi yang sangat penting.Selain itu, peneliti juga bisa langsung dapat melihat secara langsung kejadian dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Serta memiliki informasi yang jelas, akurat, dan lengkap. Saat berlangsung penelitian, peniliti harus menyesuaikan keadaan di lapangan seperti cara bahasa dan lingkungan yang ada. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan akhirnya menjadi pelapor penelitiannya.[79]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di lokasi masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Khususnya pemerintah desa dan masyarakat di desa Soki. Alasan peneliti mengambil penelitian ini adalah :

1. Sepengetahuan peneliti belum ada peneliti yang mengkaji tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh stekholder desa Soki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki.
2. Keingin tahuan peneliti akan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di laksanakan oleh pemerintah desa Soki.
3. Di Kecamatan Belo hanya ada satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang dan mengalami kemajuan.

[79]Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Data dan Sumber Data

Data adalah semua informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Jadi semua data yang berkaitan dengan penelitian belum tentu masuk dalam penelitian. Data yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan fokus penelitian.[80]

Sumber data dalam penelitian kualitatif mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan pemilik informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data penelitian kualitatif akan membentuk ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh, sehingga peneliti harus memilih sumber data yang tepat untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitiannya.[81]

Sumber data bisa diperoleh dari manusia maupun non manusia.[82] Sumber data berupa manusia bisa berupa informan yang menjadi subyek penelitian, sedangkan sumber data non manusia bisa berupa dokumen, foto dan hasil observasi yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.[83]

---

[80] Muhammad Idrus.*METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL*.Yogyakarta : Erlangga.2009. Hlm. 61
[81] Imam Suprayogo dan Tobroni.*Metode Penelitian Sosial-Agama*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2001.H1m.. 162
[82]Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar – dasar *Penelitian.* (Surabaya: eLKAF, 2006), hal. 131
[83] Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini :

1. Hasil observasi tentang implementasi BUMDes, pengelolaan BUMDes dan pelaksanaan BUMDes yang sudah di rasakan oleh masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
2. Wawancara tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki.
3. Peta Kabupaten Bima, Kecamatan Belo, dan Desa Soki.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diteliti. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki atau objek yang diteliti.

Peneliti akan melakukan observasi langsung di masyarakat desa Soki yang sudah merasakan perkembangan BUMDes. Selain itu, peneliti juga akan melakukan penelitian secara tidak langsung melalui peta lokasi di Desa Soki.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi wawancara merupakan metode

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa dengan seluruh pengurus BUMDes.

Tabel 4

Narasumber

Narasumber	Nama/Umur
Kepala Desa	Muhamad Abas
Sekretaris Desa	Mustamin
Kepada BUMDes	Siti Hawa
Sekretaris BUMDes	Anhar
Bendahara BUMDes	Fujiati
Peminjam Dana BUMDes	Siti Nur (50 tahun)
Peminjam Dana BUMDes	Hadijah (31 tahun)
Peminjan Dana BUMDes	Arnu (35 tahun)
Peminjam Dana BUMDes	Maemunah (38 tahun)
Peminjam Dana BUMDes	Hasina (45 tahun)

a. Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.[84] Analisis penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman, analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5

Analisis Data

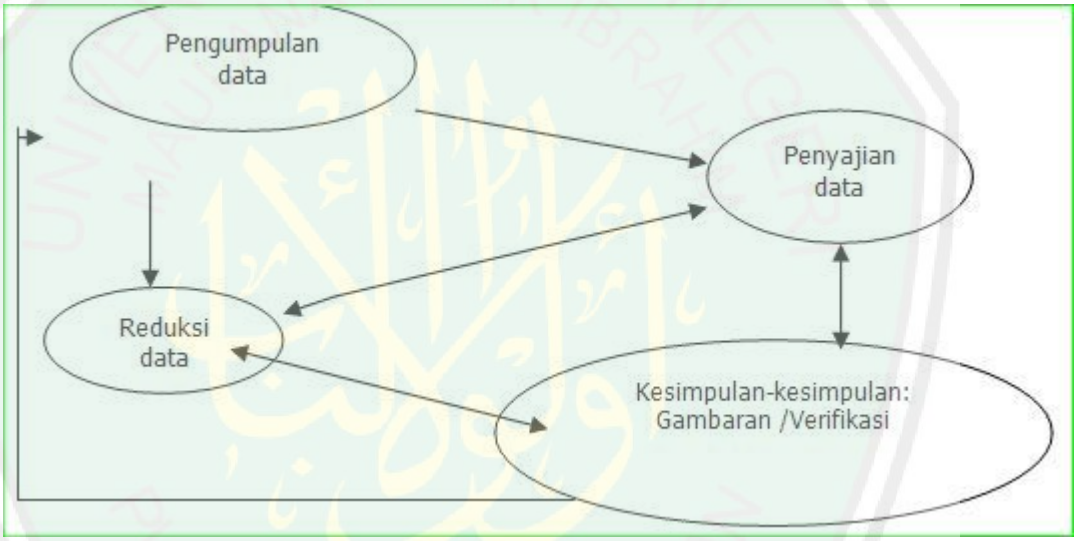

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang perlu dan membuang hal-hal yang tidak perlu.[85] Reduksi data dalam penelitian kualitatif terus berlangsung selama proses penelitian hingga laporan akhir lengkap tersusun.[86]

[84] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung : CV Alfabeta.2015..Hal 334-335
[85]Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung : CV Alfabeta.2015. Hlm. 334-335
[86] Ibid. Hal 336

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memilih data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data implementasi BUMDes yang dilakukan oleh stekholder desa Soki.

a) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan adalah teks yang naratif.[87]

Dari penyajian data diharapkan peneliti mampu memahami yang terjadi, sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi mengenai data yang sudah direduksi tentang dampak BUMDes yang dilakukan oleh stekholder desa Soki.

b) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman (2007) Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran obyek yang pada awalnya remang-remang menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

[87] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung : CV Alfabeta.2015. Hlm. 334

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Prosedur Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Ada 6 tahap, yaitu :

a) Menyusun rancangan penelitian

b) Memilih lapangan penelitian

Lokasi yang peneliti pilih sebagai lapangan penelitian adalah kecamatan Belo Kabupaten Bima, khususnya Desa Soki dan Desa Lido.

a) Mengurus perizinan

Peneliti mengurus perizinan sebagai langkah mengadakan penelitian, baik melalui wawancara, mengumpulkan dokumen sekunder dan observasi kepada Kepala Desa Soki dan Desa Lido, Menjajaki dan menilai lapangan.

Peneliti hanya menilai keadaan lapangan secara umum, seperti : kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, Desa Soki, Desa Ngali, Desa Lido.

b) Memilih dan memanfaatkan Informan

Informan adalah orang yag dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan Peneliti adalah Pemerintah Kota Kecamatan Belo Desa Soki, Desa Lido, dan Desa Ngali.

c) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan perlengkapan fisik berupa surat izin, akomodasi, alat kesehatan, bolpoin, kertas, buku catatan, recorder dan kamera foto.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Tahap Pekerjaan Lapangan

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Peneliti mengenal lapangan penelitian serta mempersiapkan diri secara fisik, penampilan.

b) Memasuki lapangan/lokasi penelitian

Dengan menjalin keakraban hubungan dengan para informan, mempelajari bahasa.

c) Berperan serta sambil mengumpulkan data

Peneliti menyusun batas masalah dan tujuan penelitian dan mencatat data yang sudah dikumpulkan

2. Tahap analisis data dan interpretasi data

Interpretasi data merupakan upaya untuk memperolah arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan.[88]

[88] Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 127-148

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Deskripsi Lokasi

1) Kabupaten Bima

Wilayah kabupaten secara geografis berkedudukan pada 1180 44’ – 1190 22’ BT dan 080 08’ – 08 057’ LS. Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Samudra Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Sape
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Kabupaten Dompu

Luas wilayah daratan kabupaten Bima lebih kurang 438.940 Ha atau 22% dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Terbagi atas 18 kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 419 dusun.Dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 436.441 jiwa dan luas wilayah 4.389,40 Km⊃2; berarti tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bima rata-rata sebesar 99.43 jiwa per Km⊃2; meningkat dari 97.12 jiwa per km2 tahun 2007. Selain itu penyebaran penduduk juga belum merata di seluruh wilayah kabupaten Bima, dengan luas wilayah kecamatan antara 66,93 Km2 s/d 627,82 km2 per Kecamatan, menyebabkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepadatan penduduk di Kecamatan cukup bervariasi yaitu antara 18,90 – 557,83 jiwa per Km⊃2.

Pertumbuhan penduduk kabupaten Bima tahun 2008 sebesar 2,38%. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2009 dan 2010 sama dengan pertumbuhan penduduk tahun 2008, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bima pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebesar 446.828 jiwa dan 457.462 jiwa.[89]

Tabel 5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima, 2010, 2014, dan 2015

Population and Population Growth Rate by Subdistrict in Bima Regency, 2010, 2014, and 2015 Kecamatan/Subdistrict		Jumlah Penduduk (jiwa)/Population (people)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun/Annual Population Growth Rate (%)	
		2010	**2014**	**2015**	**2010-2015**	**2014-2015**
1	Monta	33 548	35 293	35 697	6.41	1.14
2	Parado	8 732	9 178	9 282	6.30	1.13
3	Bolo	44 409	46 663	47 175	6.23	1.10
4	Madapangga	27 478	28 885	29 210	6.30	1.13
5	Woha	44 054	46 332	46 856	6.36	1.13
6	Belo	25 023	26 288	26 579	6.22	1.11
7	Palibelo	24 870	26 152	26 453	6.37	1.15
8	Wawo	16 305	17 165	17 364	6.49	1.16
9	Langgudu	26 381	27 745	28 067	6.39	1.16
10	Lambitu	5 088	5 364	5 433	6.78	1.29
11	Sape	53 240	55 951	56 572	6.26	1.11
12	Lambu	34 393	36 169	36 578	6.35	1.13
13	Wera	28 129	29 599	29 943	6.45	1.16
14	Ambalawi	18 233	19 175	19 391	6.35	1.13
15	Donggo	16 808	17 681	17 888	6.43	1.17

[89]http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/district/36-kabupaten-bima

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

16	Soromandi	15 521	16 316	16 499	6.30	1.12
17	Sanggar	11 866	12 480	12 624	6.39	1.15
18	Tambora	6 626	6 983	7 071	6.72	1.26
Kabupaten Bima		**440 704**	**463 419**	**468 682**	**6.35**	**1.14**

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035
Source: Indonesia Population Projection 2010–2035

Sumber: https://bimakab.bps.go.id/statictable/2016/07/21/165/jumlah penduduk-dan-laju pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bima-2010-2014-dan-2015.html

Pertumbuhan penduduk kabupaten Bima tahun 2008 sebesar 2,38%. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2009 dan 2010 sama dengan pertumbuhan penduduk tahun 2008, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bima pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebesar 446.828 jiwa dan 457.462 jiwa.[90]

[90]http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/district/36-kabupaten-bima

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 6

Peta Administrasi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

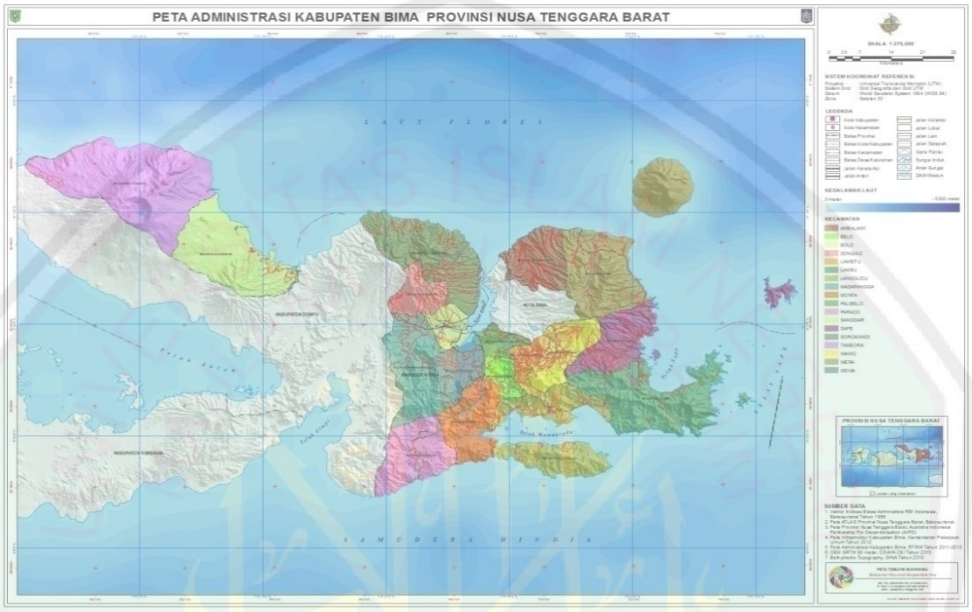

sumber: https://petatematikindo.files.wordpress.com/2014/09/administrasi-bima-a1.jpg

2) Kecamatan Belo

Kecamatan Belo adalah sebuah kecamatan dengan pusat pemerintahan kecamatan di desa Cengguh yang terletak di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. kecamatan Bima terletak di pulau Sumbawa bagian timur.

Kecamatan Belo merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan dan 1 kota yang ada di kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Secara geografis, kecamatan Bima terletak pada koordinat 8°33′0″LS,118°40′60″BT dan 8°55′0″LS,118°68′33″BT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Batas administrasi wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Godo, Kecamatan Bolo
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Daru, Kecamatan Bolo dan Kota Bima
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ntonggu, Kecamatan Belo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tente, Kecamatan Woha dan desa Talabiu, Kecamatan Woha.

Luas wilayah kecamatan Belo lebih kurang 11,634 Ha atau 2,65% dari luas wilayah kabupaten Bima dan terbagi atas 15 desa dan 36 dusun

Gambar 7

Peta Sebaran Satuan Pendidikan

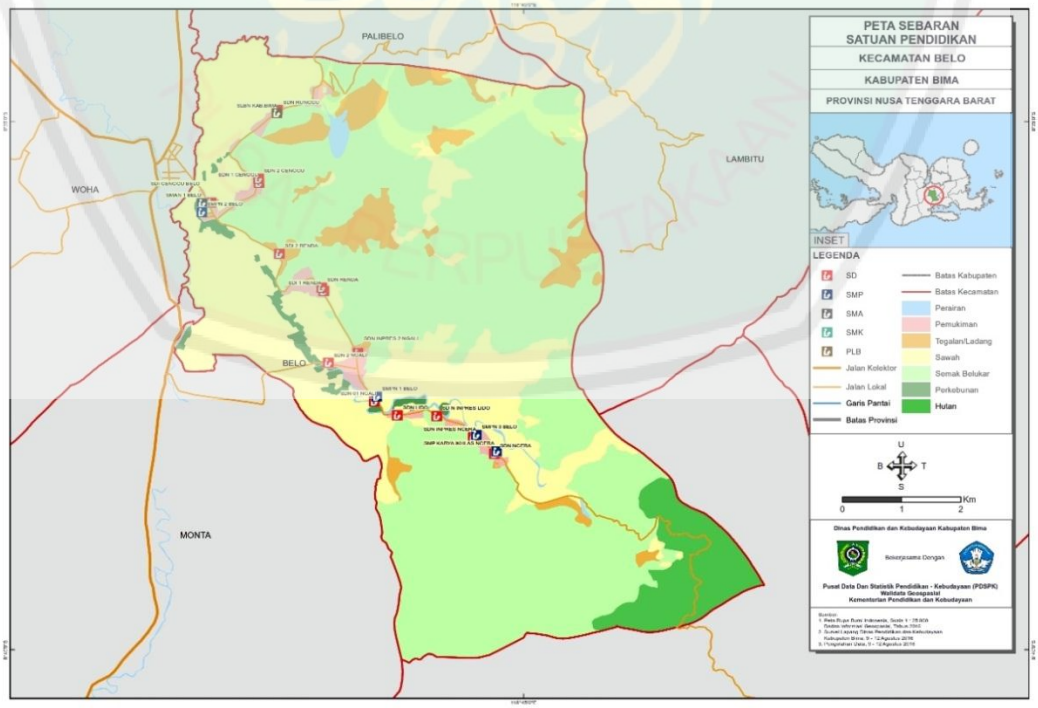

Sumber: http://egi.data.kemdikbud.go .id/upload/230604/44929.jpg

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Desa Soki

Desa Soki merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada di kecamatan Belo kabupaten Bima yang merupakan desa pemekaran dari desa Lido. Desa Soki didrikan pada tanggal 05 November tahun 2002 dengan luas wilayah 5,26 KM2 yang terdiri dari 2 kampung/dusun yaitu dusun Bewa Kalea dan dusun Oi Kalate. Kata Soki diambil dari nama "Ncoki" berarti susah.

Dengan tekad dan kerja sama serta keinginan yang kuat dari masyarakat ½ tahun telah dapat dibangun sebuah kantor desa semi permanen yang mungkin sebagai pusat pelayanan administrasi desa dengan ukuran 7,5 Mx 12 M dirasa cukup. Untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bima memekarkan kecamatan Belo menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Belo dengan wilayah mulai dari desa Roka sampai desa Soki, Kecamatan Palibelo wilayahnya terdiri dari desa Panda sampai desa Roi.

a) Asal-Usul Desa

Secara historis perkampungan Soki berada di kaki gunung Lambitu yang menempati perkampungan itu hanya beberapa keluarga yaitu keturunan Ncera dan beberapa kampung lainnya di bagian Belo Selatan. Dalam perkampungan itu tidak ada air hanya lahan gersang, maka masyarakat melakukan mbolo ro dampa (bermusyawarah dan mufakat) dengan para anggota masyarakat yg menempati perkampungan itu. Lahirlah kesepakatan sebagai berikut:

1. Menggali sumur air yang namanya "Temba Soki" sekarang dan hingga sekarang sumur itu masih ada dan air disumur itu tak pernah kering walaupun berada di cela batu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mengangkat kepala kampung, setelah lama menepati perkampungan masyarakat yang tinggal diperkampungan itu pindah ke perkampungan Ncera dan disebut sebagai "Ncera To'i". Lama kelamaan masyarakat Soki pindah ke perkampungan Lido dan sekarang menjadi desa Soki. Lebih kurang sebelum kemerdekaan RI masyarakat Soki masih bergabung dengan gelarang Ncera dan beberapa puluh tahun kemudian masyarakat Soki bergabung dengan gelarang Lido untuk menambah jumlah penduduk desa-desa kecil pada saat itu. Setelah beberapa puluh tahun kemudian lahirlah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemekaran desa. Maka masyarakat Soki melakukan musyawarah dan mufakat bahwa dusun Soki akan diajukan untuk dimekarkan dari desa Lido untuk menjadi desa definitif.

b) Sejarah Pemerintah Desa

Desa Soki setelah dimekarkan dari desa Lido kecamatan Belo pada tanggal 05 November tahun 2002 merupakan implementasi dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang diresmikan oleh Bupati Bima Drs. H. Jainul Arifin, M.Si. Adapun susunan Pemerintahan Desa Soki sebagai berikut:

(1) Tanggal 05 November Tahun 2002 s/d Agustus Tahun 2003 menjadi karteker Kepala Desa Soki M. Yasin H. Den

(2) Bulan Agustus 2003 s/d Juni Tahun 2008 menjadi Kepala Desa Soki Definitif M. Kasim, BSW. S.Sos.

(3) Bulan Juni s/d Tanggal 07 Oktober Tahun 2008 yang menjadi Pj. Kepala Desa Murtalib H.I, S.Pd.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Tanggal 07 Oktober tahun 2008 s/d Tanggal 07 Oktober 2014 yang menjadi kepala Desa Drs. Yakub M. Jafar.

(5) Tanggal 07 Oktober Tahun 2014 s/d sekarang yang menjadi Pj. Kepala Desa Soki adalah Murtalib H.I, S.Pd.

c) Sejarah Pembangunan Desa

Desa Soki adalah salah satu desa yang pembangunannya juga berkembang seiring dengan perubahan zaman yang dalam hal pelaksanaanya selalu dilandasi dengan nilai – nilai gotong royong dan kebersamaan yang berazaskan "Mbolo Ro Dampa" dalam hal pengambilan keputusan. Dalam kesempatan ini akan diuraikan riwayat pembangunan dalam 2 (dua) periode kepemimpinan sejak berdirinya desa Soki sebagai berikut:

(1) Pada tahun 2002 masyarakat desa Soki membangun 1 (satu) unit kantor desa secara swadaya yang berukuran 6 x 8 M2 didirikan diatas bukit Bewa Kalea, pada tanggal 5 (lima) November 2002 dusun Soki didefinitifkan menjadi desa Soki.

(2) Pada tahun 2003 tidak ada kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum karena sepanjang tahun itu pemerintah disibukkan dengan persiapan pemilihan kepala desa definitif.

(3) Pada tahun 2004 pemerintah desa Soki dibawah pimpinan kepala desa M. Kasim Bsw. membangun Talud Sori salongga sepanjang 11 (sebelas) meter yang bersunber dari dana subsidi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Pada tahun 2005 pembangunan fondasi kantor desa Soki, disamping itu juga mendapatkan bantuan ternak kambing dari dinas sosial sebanyak 50 (lima puluh) ekor kambing untuk 5 (lima) KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

(5) Pada tahun 2006 membangun saluran keliling kampung yang melintas di wilayang Rt 08, 05 dan Rw 03 dari dana subsidi Desa. Dan bantuan ternak sapi satu kelompok dari dinas peternakan propinsi.

(6) Pada tahun 2007

a) Saluran raba salongga sepanjang 50 meter yang bersumber dari dana subsidi desa.
b) Pembangunan saluran DAM Diwu Lopi sepanjang 150 meter dengan dana yang bersumber dari APBD II
c) Pembangunan kantor desa permanen dari dana stimulan APBD II
d) Pembukaan gang baru sekaligus rabatnisasi sepanjang 350 meter serta
e) Pembangunan jembatan titian sepanjang 15 meter dari dana PNPM- MP.

(7) Pada tahun 2008 pembangunan lanjutan saluran raba salongga sepanjang 70meter yang bersumber dari dana subsidi desa.

(8) Pada tahun 2009 pembangunan saluran Raba Due sepanjang 100 meter yang bersumber dari dana subsidi desa, dan pembangunan lanjutan saluran dam diwu Lopi sepanjang 1 km dari dana PNPM-MP dan pembanngunan Poskesdes Desa Soki dari dan APBD II dibawah kepemimpinan kepala desa yang ke 2 (dua) Drs. Yakub M. Jafar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(9) Pada tahun 2010 pengecoran Gang di Rt 09/06 dari dana subsidi desa. Dan dari dana PNPM-MP melaksanakan pembangunan Drainase lingkungan/jalan raya yang melintasi RT 01, 02 dan 03 sepanjang 300 M serta pembangunan saluran irigasi raba salongga sepanjang 1,5 Km.

(10) Pada tahun 2011 pemasangan pagarnisasi pagar so dengan kawat berduri yang bersumber dari dana subsidi desa dan dari dana swadaya masyarakat pemilik lahan dengan volume 1,5 Km.

(11) Pada Tahun 2012

(a) Peningkatan saluran irigasi Dam Diwu Lopi sepanjang 100 meter yang bersumber dari dana subsidi desa.

(b) Pembangunan Saluran La Mpari sepanjang 350 M yang bersumber dari dana PNPMP-MD.

(c) Reklamasi lahan So Nggaro hidi seluas 10 Ha. Yang bersumber dari dana APBD I melalui dinas pertanian.

(d) Pembangunan Tower Telkomsel

(12) Pada Tahun 2013

(a) Pembangunan pagarnisasi lingkungan (Lomba Desa) yang bersumber dari dana subsididesa.

(b) Pembangunan MCK di wilayah dusun Oi Kalate yang bersumber dari dana APBD II.

(c) Pembukaan jalan ekonomi menuju so salongga sepanjang 490 M yang bersumber dari dana APBD II.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(d) Pembangunan tiang Masjid Al-Ikhlas yang bersumber dari dana aspirasi dewan propinsi.

(13) Pada Tahun 2014

(a) Pembangunan drainase jalan raya sepanjang yang bersumber dari dana subsidi desa.

(b) Peningkatan jalan ekonomi sepanjang 490 M yang bersumber dari dana PNPM-MPd.

d) Kondisi Geografi

Desa Soki adalah merupakan salah satu desa dari sembilandesa yang ada di bagianSelatanpusat kota kecamatan Belo dengan luas wilayah 5,26 Km2. Dengan jumlah penduduk 1.734 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 843 orang perempuansebanyak 891 orang dan memiliki kepala keluarga sebanyak 446 KK dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Ngali dan Desa Sambori Kec. Lambitu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Daro,o Kec. Langgudu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Lido Kec. Belo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Ncera Kec. Belo

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Sokipada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dll.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 8

Peta Desa Soki

Sumber: https://1.bp.blogspot.com/mgNop6XMLVw/VMUQM41eTyI/AAAAAAAAAiw/yQtZxdO1Yec/s1600/1.jpg

e) Visi Dan Misi Desa Soki

(1) VISI DAN MISI

(a) VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Soki ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Soki seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan Belo mempunyai titik sektor pertanian.

“ Terwujudnya masyarakat Desa Soki yang adil, sejahtera dan bermartabat melalui peningkatan Sumber Daya Manusia serta mampu mengelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan “

(b) MISI

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut.Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhandesa Soki,sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa Soki adalah :

1) Membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, professional, efektif, efesien bersih dan berwibawa.
2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan bersaing dengan desa-desa lain.
3) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa Soki untuk kemakmuran rakyat.
4) Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang murah dan cerdas.
5) Membangun kesadaran kerjasama di semua baik dengan tataran pemerintahan desa dengan semua lembaga maupun dengan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Mengayomi, mendorong pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal yang ada di desa dalam rangka membangun desa.
7) Menggali poetensi sumber daya alam untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
8) Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif yang berbasis Pemberdayaan.
9) Membangun dan mendorong usaha ekonomi masyarakat di berbagaisektor.

1) Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk desa dari tahun semakin bertambah, meskipum tidak seimbang dengan perkembangan perekonomian hingga masyarakat desa. Apalagi masih ada sebagian masyarakat desa yang berasumsi bahwa desa adalah tempat yang kumuh yang tidak mengalami perkembangan. Sehingga perkembangan sumber daya manusia di desa semakin bertambah sedangkan sarana dan prasarana tidak memadai.Untuk memadaikemajuan daerah harus merata dari semuaaspek.Adapun kondisi sumber daya manusia yang ada di desa Sokimenurut jumlah Penduduk, Jumlah KK, Pendidikan dan Kesehatan sebagai mana pada table dibawah ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 6

Jumlah Kependudukan

Penduduk (orang)	Tahun		% Perkembangan	
	2015	2016		
Laki – laki	843	866		
Perempuan	891	924		
Jumlah	1734	1790		

Sumber: RJMMDes ACC (Repaired) II

Tabel 7
Jumlah Keluarga

Kepala keluarga	Tahun		% Perkembangan	
	2015	2016		
Laki – laki	377	395		
Perempuan	69	73		
Jumlah	446	468		

Sumber: RJMMDes ACC (Repaired) II

Tabel 8
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	**Orang**
Usia 3-6 tahun yang masuk TK	184
Jumlah yang masih SD/tamat SD	305
Jumlah yang masih SLTP/ Tamat	259
Jumlah yang masih SLTA/ Tamat	385
Jumlah yang (D1, D2, D3)	5
Jumlah Yang (S1, S2, S3)	198/5
Jumlah yang buta aksara	148

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jumlah Yang Belum Sekolah	190
Jumlah Penduduk	1790

Sumber: RJMMDes ACC (Repaired) II

Tabel 9

Kesejahteraan Keluarga

No	Kondisi keluarga	Jumlah KK
1	Keluarga prasejahtera	227
2	Keluarga sejahtera 1	95
3	Keluarga sejahtera 2	88
4	Keluarga sejahtera 3	38
5	Keluarga sejahtera 3 Plus	-
Jumlah		**448**

Sumber: RJMMDes ACC (Repaired) II

Secara administrasi Desa Soki Kecamatan Belo. Terbagi Dalam Dua Dusun, Dengan luas wilayah + 169,000 hektar :

Tabel 10

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Soki terbagi 2 Dusun

No	Dusun	Banyaknya			Luas (Km2)
		Penduduk	Jenis Kelamin		
			Laki	Pr	
1	Bewa Kalea	959	453	506	3,11
2	Oi Kalate	775	385	390	2,15
3	Jumlah	1734	838	896	5,26

Sumber Data: Data masing-masing dusun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 9

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DESA SOKI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA

PERDA KAB. BIMA

NOMOR : 3 Tahun 2008

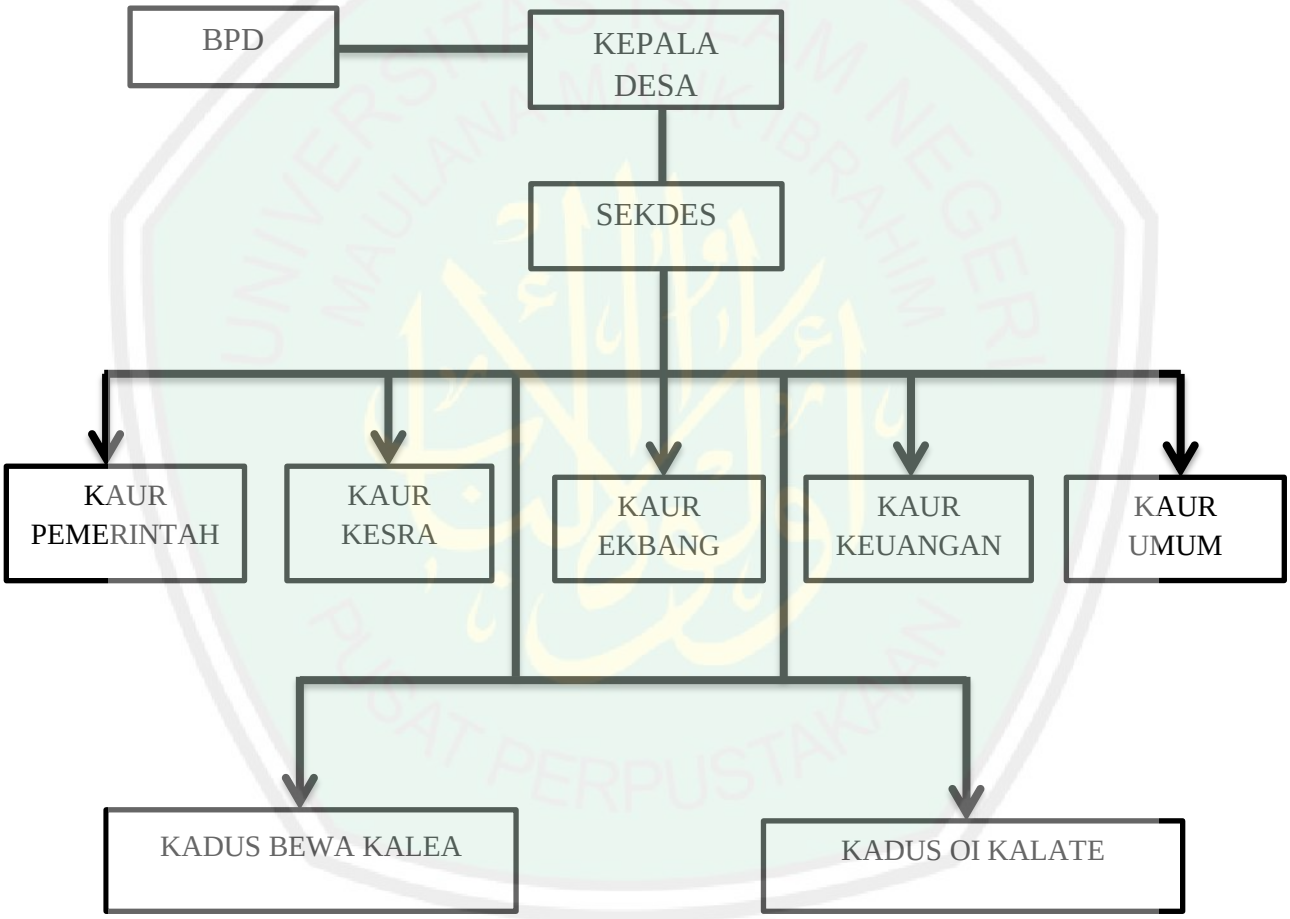

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari pengamatan tersebut peneliti dapat melihat pembentukan BUMDes di tingkat kecamatan Belo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa desa di kecamatan Belo dari segala segi dari jumlah sembilan desa mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing sesuai potensi dan pemanfaatan masyarakat khususnya di desa Soki mengenai adanya BUMDes dari pemaparan data saat wawancara oleh Kepala Desa bapak Abas Muhamad.

> "Tahun 2013 langsung dengan penyertaan modal Rp. 10.000.000 juta lalu ditahun 2014 kita mengikuti lomba di kabupaten Bima dapat juara 2 di tingkat desa sehingga kita dana bantuan di tingkat propinsi Rp. 100.000.000 juta sehingga di dalam 100.000.000 juta untuk modal Bumdes lagi 30.000.000 juta 30.000.000 lagi tahun 2014 masuk di tahun 2015 lagi kita memberi dana juga 30.000.000 juta dari dana desa terus masuk 2016 memberikan dana Bumdes 25.000.000 terus di tahun 2017 40.000.000 terus kemarin juga hasil musyaarah di desa bahwa kita juga menetapkan pada tahun 2018 untuk anggaran 2018 masih di rencanakan sudah di tetapkan."[91]

Adanya BUMDes akan ada modal yang akan diberikan pemerintah di kabupaten, tingkat propinsi, mapun pemerintah pusat untuk mendukung program dan kegiatan BUMDes di berbagai desa hingga mampu mengembangkan masyarakat desa mandiri.

> "Bukan per kelompok atau individu berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang ada di desa sendiri tapikan di tahun 2013-2015 Bumdes itu belum memiliki perdes tentang Bumdes Peraturan Desa artinya kita masih memakai aturan-aturan yang dibuat di tingkat desa saja. Jadi setelah lahirnya undang-undang tentang desa ini di perlakukan wajid itu sifatnya untuk Bumdes itu wajib harus ada perdesnya mulai tahun 2016 sehingga kita melakukan acuan perdes pada saat kita raker kamerin tentang Bumdes itu. Akhirnya memusyaarakan dengan seluruh yang ada di desa dan seluruh yang ada di lembaga desa kaitan masalah desa dan peraturan desa artinya yang menyangkut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (ADRT) itu berdasarkan musyawarah atau rapat daripada pemerintah desa dan lembaga desa sebagai perwakilan masyarakat desa."[92]

[91]Hasil wawancara dengan Bapak Abas Muhamad Kepala Desa Soki, di rumah bapak Abas, Hari Minggu 30 Desember 2018, Jam 05.00 WIB.
[92]Hasil wawancara dengan Bapak Abas Muhamad Kepala Desa Soki, di rumah bapak Abas, Hari Minggu 30 Desember 2018, Jam 05.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi desa. Sehingga masyarakat desa tidak terlalu mengantungkan harapannya kepada pemerintah, disinilah masyarakat harus mampu mengelola, meggali dan memanfaatkan potensi desa.

> "Tidak ada undang-undang tersendiri cuman di sana itu pemerintah desa ada keputusan Kepala Desa, keputusan Kepala Desa terkaitannya dengan masalah Bumdes kalau terkait dengan undang-undang Bumdesnya yaitu perdesnya adalah buat di jadikan pemerintah desa lembaga desa yang di desa perwakilan masyarakat. Kaitannya masalah keuangannya bentuk pengelolaan simpan pinjam jadi tata cara pengelolaan keuangan Bumdes berdasarkan aturan-aturan main yang telah di buatkan bersama-sama di musyawarah desa artinya belum peres saat itu hanya aturan-aturan belum perdes."[93]

Meskipun saat pertama kali pembentukan BUMDes tidak langsung adanya perdes yang mengatur pengelolaan BUMDes di desa Soki tapi dari pemerintah desa mempunyai peraturan-peraturan yang dibuat melalui musyawarah mufakat untuk mengatur pengelolaan BUMDes hingga dapat mengatur sesuai ketentuan yang berlaku.

> "Jadi pada saat itu anggaran di kelola dengan cara simpan pinjam masuk di anggaran 2016-2017 kita alihkan pengelolaannya yaitu melakukan perdangan obat-obatan bawang untuk kebutuhan masyarakat karena di desa kami adalah 100% memerlukan obat-obatan yang sangat membutuhkan obat-obatan sehingga kami akan alihkan pengelolaan itu kepada perdangan obat-obatan. Program 2013-2015 simpan pinjam 100% masuk tahun 2016-2017 walaupun ada simpan pinjam itu hanya ada ± 15% saja kita siapkan dana/anggaran simpan pinjam kita lebih fokus perdangan obat dengan cara melakukan perdangan obat sehingga kita mampu meningkatkan anggaran daripada Bumdes itu artinya itu adalah salah-satu cara untuk mempercepat proses dan kenapa kita alihkan ke perdangan obat karena simpan pinjam itu pertama banyak juga masyarakat itu yang mengatakan bahwa uang simpan pinjam itu uang pemerintah mau kita kembalikan oke mau kita tidak kembali

[93]Hasil wawancara dengan Bapak Abas Muhamad Kepala Desa Soki, di rumah bapak Abas, Hari Minggu 30 Desember 2018, Jam 05.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> oke berpedoman padahal itu perdangan obat itu jadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana Bumdes itu tidak berdasarkan apa yang menjadi keinginan daripada kepengurusan Bumdes tidak itu semua berdasarkan peraturan desa yang telah kita buat bersama dengan lembaga desa itu karena di dalam perdes itu mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepengurusan sampai dengan terpilih terakhir sampai dengan pelaksanaanya itu sudah tercantum semua di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) Bumdes itu termasuk prosentasi gaji di dalam pengelolaan pengurus semua tercantum artinya tidak semuanya untuk megelola anggara itu tidak ketika dia melakukan pengelolaan anggarannya itu di laur daripada itu maka kepengurusan itu dia akan bertanggung jawab secara hukum secara administrasi .”[94]

Program utama saat mulai pembemtukan BUMDes AINA NEFA di desa Soki adalah SPP (Simpan pinjam) hampir 99% tapi melihat kondisi masyarakat seperti harus adanya pengelolaan air bersih dan penjualan obat khususnya pestisida untuk memenuhi kebutuhan petani karena hampir 90% masyarakat desa Soki berprofesi sebagai petani hingga mengalih program simpan pinjam ke perdangagan obat-obatan untuk petani bawang merah.

(1) Bentuk dan Jenis Kegiatan

Berdirinya BUMDes di landasi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Dengan meningakatkan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Untuk membangun masyarakat desa dalam seluruh aspek yang di tangani instasinya masing-masing sesuai dengan pelaksanaan yang ada. BUMDes merupakan salah-satu lembaga usaa desa yang di kelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkat perekonomian masyarakat desa yang dibentuk sesuai potensi

[94]Hasil wawancara dengan Bapak Abas Muhamad Kepala Desa Soki, di rumah bapak Abas, Hari Minggu 30 Desember 2018, Jam 05.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

desa. Terbentuk BUMDes melatih, menjaga, mengelola dan menfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada desa dapat dikelola dengan baik oleh masyarakatnya sendiri.

(2) Visi Misi BUMDes AINA NEA

(c) Visi

Visi BUMDes "AINA NEFA" mewujudkan kesejahteraan Desa Soki melalui pengembangan usaha ekonomi dalam pelayanan sosial.

(d) Misi

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
2. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
4. Mengelola dana program yang masuk ke dana desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

Tujuan

1. Menghidupkan dan menumbuhkan kegiatan dan semangat perekonomian bagi masyarakat.
2. Mengurangi angka penganguran dan kemiskinan secara berkala,
3. Meningkatkan pendapatan dan kesehteraan masyarakat,
4. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat,
5. Meningkatkan pendapatan asli desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk mencapai visi misi BUMDes AINA NEFA, strategi yang di kembangkan BUMDes AINA NEFA ini untuk mewujukan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha, mengurangi kemiskinan, pengangguransecara bertahap, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Berdasarkan visi misi ini BUMDes AINA NEFA harus mampu mengimplementasikan segala aspek yang ada setiap kegiatan yang dilakukan BUMDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pengurus BUMDes tersebut.

(3) Tujuan Program BUMDes AINA NEFA

Tujuan program BUMDes AINA NEFA adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha dan mengurangi kemiskinan di desa dengan mendorong kemandirian desa dan membangun masyarakat desa sesuai potensinya, tujuan khususnya meliputi:

a. Menggali pendapatan asli desa melalui unit usaha yang dikelola oleh BUMDes
b. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa
c. Memberikan kesempatan bagi warga masyarakat desa untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki, atau bahkan menambah unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di desa Soki yaitu pengelolaan air bersih.
d. Meningkatkan kreativitas usaha berwirausaha anggota masyarakat desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Meningkatkan jiwa sosial seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang kekurangan atau sekelompok masyarakat sehingga mampu bekerja sama satu sama lain untuk saling membantu antar arga.

f. Menyatukan kerjasama antar desa melalui kegiatan BUMDes hingga terjalin hubungan keakraban antar satu desa dengan desa lainnya.

g. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sehingga mampu mengentas kemiskinan yang ada di desa.

h. Menyediakan sarana dan prasarana masyarakat untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan BUMDes AINA NEFA untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat.

(4) Dasar Hukum BUMDes AINA NEFA

(e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomir 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan BUMDes;

(f) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

(g) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, dan Pengelolaan Pembubaran Badan Usaha Milik desa;

(h) PERDES Nomor 03 Tahun 2016 tentang Bumdes Usaha Milik Desa Soki.

(i) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

(j) Surat Keputusan Kepala Desa Soki Nomor: 09, 09 tentang Pengangkatan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.[95] Bisa lihat berarti BUMDes pemudahan modal yang paling utama adalah bersumber dari masyarakat sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk meminjam modal dengan mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar BUMDes seperti pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat propinsi maupun pihak lainnya.

Program BUMDes AINA NEFA merupakan program untuk pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatankesejeahhteraan masyarakat atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi semakain banyak aspek kebutuhan tersebut.[96] Pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan dengan adanya BUMDes sangat mempermudah masyarakat seperti memgembangkan usaha, membuka usaha baru, melatih skill masyarakat, dan memanfaatan daya desa untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan BUMDes AINA NEFA di desa Soki merangkul semua elemen masyarakat yang tidak sekedar hanya jadi objek tetapi sebagai mitra kerjasama atau subjek pembangunan masyarakat. Dengan demikian adanya program kegiatan dapat mewadahi masyarakat untuk mengembangkan

[95]Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 5

[96] Soetomo. 2006. *Pembangunan Masyarakat*. Yogjakarta. Pusataka Pelajar. Hlm. 164

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketrampilan yang di milikinya serta menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat di ketahui dan permasalahan.

a. kegiatan yang akan di danai BUMDes dan simpan pinjam (SPP) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria tertentu:

1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau keluarga prasejahtera.
2) Memenuhi kebutuhan masyarakat desa atau antar desa.
3) Memberikan dampak langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa khusus bagi mereka yang tidak mampu.
4) Memberikan dampak langsung bagi perkembangan perekonomian masyarakat desa.
5) Dikerjakan oleh masyarakat desa
6) Di dukung oleh sumber daya yang ada
7) Mendukung kualitas hidup masyarakat desa tanpa merusak lingkungan hidup.

Pelaksanaan BUMDes yang di kelola oleh masyarakat dan pengurus BUMDes di desa Soki sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masyarakat desa. Adapun program-programnya meliputi simpan pinjam (SPP), Perdagangan obat-obatan, dan pengolahan air bersih. Kerjasama masyarakat, pengurus BUMDes dan pemerintah desa sangat di perlukan untuk meningkatkan pengolahan BUMDes hingga terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seperti hasil wawancara dengan Bapak kepala Desa Soki Abas Muhamad seperti ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Dari mulai terbentuk BUMDes koordinasi antar pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa dan masyarakat masih lancar, walau ada beberapa mis komunikasi tapi masih teratasi hingga mampu menciptakan komunikasi lebih efektif antar Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes. Cuman hanya saya harus rutin melihatnya semua pengelolaannya."[97]

Dengan demikian pemerintah desa dengan pengurus BUMDes harus berkerjasama dalam melaksanakan kegiatan BUMDes untuk mengembangkan pengelolaan BUMDes AINA NEFA apalagi pengelolaan masih harus terus di kembangkan dalam berbagai segi kualitas sumber daya manusia terus di tingkatkan maupun dari segi pengelolaan kegiatan BUMDes harus di tingkat untuk mengoptimalkan pelaksanaan BUMDes untuk mengejar ketertinggalan BUMDes yang sudah maju dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

2. EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Pada saat pembentukan BUMDes AINA NEFA di desa Soki pada tahun 2014. Hingga saat ini, Desa Soki telah mendapat dana bantuan langsung dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk masyarakat desaSoki dan dana tersebut di kelola oleh masyatakat secara mandiri melalui program-program yang ada di BUMDes AINA NEFA. Dana-dana tersebut untuk membiayai segala kegiatan yang akan di laksanakan BUMDes AINA NEFA yang disambut baik oleh seluruh masyarakat saat ini.

Program BUMDes AINA NEFA merupakan program pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat memerlukan keterlibatan masyarakat yang paling signifikan meningkatkan pelaksanaan program BUMDes AINA NEFA terutama dalam meningkatkan pendapat

[97] Hasil wawancara dengan Bapak Abas Muhamad Kepala Desa Soki, di rumah Bapak Abas, hari Minggu 30 Desember 2018, jam 05.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat desa. Pelaksanaan program BUMDes AINA NEFA untuk menuju pembangunan nasional menuntut peran seluruh aspek masyarakat serta dari pemerintah desa untuk mendukung proses pembangunan desa. Hal seperti yang sudah di paparkan oleh Ibu Siti hawa selaku Ketua BUMDes AINA NEFA selaku pengelolaan BUMDes.

> "Luar biasa antusias karena kenapa tidak antusias ini kan memang membantu masyarakat."[98]

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes AINA NEFA di Desa Soki, BUMDes merangkul semua elemen masyarakat tidak sekedar sebagai objek tetapi juga sebagai mitra kerja atau juga sebagai subjek pengembangan. Dengan kata lain lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat di ketahui potensi dan masalah desa tersebut.

Tahapan pelaksanaan kegiatan program BUMDes Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan diawali dengan dengan perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasiawal, serta perencanaan di desa, kecamatan, dan kabupaten pengelolaan BUMDes di desa.

1) Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian erat kaitannya dengan pekerjaan masyarakat dan sesuai sumber mata pencaharian masyarakat yang mayoritas pekerjaan sebagai petani yang merupakan penghasilan utama bagi masyarakat desa Soki. Sesuai dengan potensi masyarakat desa, masyarakat memilih pekerjaan sesuai potensi,

[98] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti hawa Ketua BUMDes AINA NEFA, di rumah Ibu Siti hawa, Hari Rabu 9 November 2017, Jam 12.20 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bidang, dan keahlian masing-masing dari jumlah penduduk dari jenis kelamin Laki-laki 1734 Perempuan 1790 tahun 2015-2016.

Salah-satu misi pemerintah adalah membangun daerah pendesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan anekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pendesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

Secara umum dapat dijelaskan baha Desa Soki bermata Pencarian Petani, Buruh tani, Pedagang, Wiraswasta, PNS, TNI, POLRI, dan lainnya. Dalam dokumen ini kami tampilkan gambar kondisi ekonomi masyarakat Desa Soki secara umum berdasarkan:

Tabel 11
Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah %
1	Petani	300 Jiwa
2	Buruh tani/buruh bangunan	155 Jiwa
3	Buruh harian lepas	35 Orang
4	Pedagang	42 orang
5	Wiraswasta	16 Orang
6	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	11 Orang
7	Peg. Swasta	23 Orang
8	Jasa Angkutan (Sopir)	3 Orang
9	Peternak	13 Orang
10	Tukang bangunan/montir /Jahit/Bengkel	13 Orang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11	Pengrajin	5 Orang
12	Guru Swasta	25 Orang
13	Belum Bekerja	559 Orang
Jumlah		1.33 Orang

2) Kondisi Sosial Budaya

Secara sosial budaya kehidupan masyarakat masih memakai rumah panggung untuk berkumpul saling berinteraksi dengan baik sehingga hubungan antara satu dengan lainnya tetap saling terjaga. Karena masyarakat masih guyub antar warga satu dengan yang lainnya sehingga masyarakat terciptanya masyarakat sejahtera. Apalagi ada kegiatan yang berhuungan seperti Karang taruna, Kegiatan BUMDes, 17 Agustus 1945, MTQ tingkat desa, PKK, dan lainnya. Semua kegiatan ini yang pastinya akan melibatkan banyak warga sehingga semua masyarakat akan ikut berpartisipasi. Dari jumlah penduduk3.524 orang penduduk yang beragama Islam hampir 100%. Kondisi kehidupan beragama masih sangat baik, rukun, tenang, damai, tentram dan sejahtera. Saling menghormati dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai permaslahan yang ada di masyarakat maupun di luar masyarakat. Seperti Musibah kematian, Kecelakaan, dan Gotong royo.

Sikap dan pola hidup masyarakat Desa Soki merupakan cerminan dan nilai-nilai kehidupan beragama. Sebagai masyarakat yang mempunyai kepercayaan pasti memerlukan tempat peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain:

a) Masjid = 1

b) Musholla/Langgar = 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Gambaran umum Badan Usaha Milik (BUMDes) Desa Soki

Pemerintah desa Soki membentuk BUMDes sebagai wadah dan pergerakan desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyrakat sesuai dengan kompetensi yang di miliki desa sehingga masyarakat bisa berkembang sesuai dengan kreativitas dan kemampuan mereka miliki.

Salah-satu misi pemerintah adalah membangun daerah pendesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pendesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung rantai produksi dan pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pendesaan.

Tabel 12

PROFIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AINA NEFA

1.	Nama BUMDes	AINA NEFA
2.	Desa	Soki
3.	Kecamatan	Belo
4.	Kabupaten	Bima
5.	Propinsi	Nusa Tenggara Barat (NTB)
6.	Tahun Berdiri	Senin, 9 Februari 2015
7.	Dasar Pembentukan	Musyawarah Desa ST. Hawah (Ketua) Anhar, S.E (Sekretaris) Fujiati (Bendahara)
8.	Alamat	Desa Soki
9.	Jenis usaha	1. Simpan pinjam (SPP) 2. Pengelolaan Air Bersih 3. Perdangangan Obat-obatan
10.	Sumber Pendanaan	- Bantuan permodalan dari APBD I - Penyertaan modal dari APBDes

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11.	Aset Desa yang Dimanfaatkan BUMDes	-
12.	Omset Usaha (Perbulan/Pertahun)	-
13.	Kekayaan/Aset BUMDes	Rp 85.000.0000

b) Program-Program BUMDes

(1) Program Simpan Pinjam (SPP)

Program simpan pinjam sudah mulai sejak tahun 2014 saat dikelola langsung oleh pengurus BUMDes dimana anggaran dari propinsi sebagai hadiah juara 2 tingkat desa. Kemudian yang kedua ditahun 2015mendapatkan anggarandariADD senilai 25.000.000. Sehingga berkembang dengan baik. Sasarannya kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin sehingga diberikan kepada mereka berupa dengan segala jenis usaha misalnya usaha bakulan, Jual beli bawang, Kios, Mengobati bawang merah, dan Mengobati padi dari hama. Adapuncaramereka pengembalian dan pembayaran kita pakai musiman misalnya petani mengajukan pinjaman kebutuhan petaninya di musim pertama dia mengembalikan berapa dulu. Kemudian di musim kedua dia membayar lagi dimusim ketiga. Jadi, kita pakai musiman. Dengan bunga yang bermacam-macam 10%, 15%, 20%.

(2) Program Pengelohan Air Bersih

Penambahan program pengolahan air bersih di mulai pada tahun 2017 untuk membantu masyarakat desa Soki yang membutuhkan air bersih melihat kondisi masyarakat yangseperti ini kepala desa dan pengurus BUMDes untuk mengelola air bersih sehingga mampu mencukupi kebutuhan masyarakat desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tidak saja untuk memenuhi kebutuhan air bersih melainkan membantu pengolahan perekonomian desa yang di lakukan dalam kegiatan Bumdes hingga meningkatkan pendapatanmasyarakat desa. Serta meningkat kegiatan Bumdeshigga membuat masyarakat berpartisipsi aktif dalam kegiatan masyarakat.

(3) Perdangan Obat (Pestisida)

Program perdangan obat di mulai masuk di anggaran 2016-2017 sehingga kami alihkan pengeloaan itu ke perdangan obat-obatan untuk kebutuhan masyarakat.

Selain di kelola dengan cara simpan pinjam masuk di tahun 2016-2017 pengurus alihkan pengelolaannya yaitu melakukan perdangan obat-obatan bawang merah untuk kebutuhan masyarakat karena di desa Soki adalah petani maka hampir 99% memutuhkan obat-obatan sehingga kami akan pengurus BUMDes pengelolaan itu di alihkan perdangan obat-obatan. Program 2013-2015 simpan pinjam 100% masuk tahun 2016-2017 walaupun ada simpan pinjam itu hanya ada ± 15% saja kita siapkan dana/anggaran simpan pinjam kita lebih fokus perdangan obat dengan cara melakukan perdangan obat sehingga kita mampu meningkatkan anggaran daripada Bumdes itu artinya itu adalah salah-satu cara untuk mempercepat proses dan kenapa kita alihkan ke perdangan obat karena simpan pinjam itu pertama banyak juga masyarakat itu yang mengatakan bahwa uang simpan pinjam itu uang pemerintah mau kita kembalikan oke mau kita tidak kembali oke berpedoman padahal itu perdangan obat itu jadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bumdes itu tidak berdasarkan apa yang menjadi keinginan daripada kepengurusan Bumdes tidak itu semua berdasarkan peraturan desa yang telah kita buat bersama dengan lembaga desa itu karena di dalam perdes itu mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepengurusan sampai dengan terpilih terakhir sampai dengan pelaksanaanya itu sudah tercantum semua di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) Bumdes itu termasuk prosentasi gaji di dalam pengelolaan pengurus semua tercantum artinya tidak semuanya untuk megelola anggara itu tidak ketika dia melakukan pengelolaan anggarannya itu di laur daripada itu maka kepengurusan itu dia akan bertanggung jawab secara hukum secara administrasi.

c) Potensi Yang Dikembangkan

Bahan potensi yang imiliki masyarakat desa Soki merupakan asset yang sangat potensial untuk dikembamgkan dalam meningkatkan inisiatif, kreatiitas serta dapat meningatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang usaha produktif, komiditi yang dapat dikembangkan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran.

Adapun potensi-potensi tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Lahan pertanian yang sangat luas dengan komoditi keunggulan bawang merah.
(2) Sumber mata air yang belum dikelola.
(3) Pengrajin Tenun Ikat (Sarung Nggoli)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Kebutuhan masyarakat terutama obat pertanian dan bahan bangunan lainnya masih membeli diluar desa dan kecamatan Belo dan masih banyak potensi lain yang masih dapat dikemabangkan.

d) Tantangan

Bahwa masyarakat desa saat ini sedang menghadapi banyak perubahan, sehingga dituntut adanya kreativitas dan pengembangan diri baik aparatur desa maupun masyarakat sehingga secara jeli dapat melihat adanya peluang untuk dapat bersaing dengan dunia luar. Namun potensi wilayah yang dimiliki tidak terekspos karena keterbatasan SDM, dan penangganan secara kelembagaan, hingga perlu adanya sentuhan bimbingan secara tehnis tentang manajemen pengelolaan potensi sumber daya dan juga sentuhan sarana dan modal usaha pengembangan.

e) Upaya Yang Telah Dan Akan Dilakukan

(1) Bagi masyarakat desa khususnya desa Soki yang kekurangan modal tetapi mau berusaha dapat meminjam untuk mengembangkan modal usahanya.

(2) Pada saat musim tanam, petani dapat meminjam sebagai modal membeli bibit dan biaya pengelolaannya, dan pengembaliannya dapat dilakukan pada saat musim panen;

(3) Masyarakat tidak lagi memenuhi kebutuhannya dengan menempuh jarak jauh untuk membeli kebutuhan obat-obat pertanian dan lainnya.

(4) Masyarakat tidak lagi meminjam pada rentenir dengan bunga yang tinggi.

(5) Terjaringnya lapangan kerja yang cukup tinggi melalui BUMDes.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(6) Mendekatkan pelayanan untuk melayani Pembayaran listrik, air minum, jasa-jasa lainnya.

f) Pengelolaan

(1) Manajemen pengelolaan potensi desa dijalankan melalui mekanisme BUMDes yang berbasisi masyarakat,

(2) Pengelolaan potensial desa melalui BUMDes yang berbasis masyarakat akan menjamin pemanfaatan secara adil, merata dan berkelanjutan serta dapat meminimalisir konflik,

(3) Pengelolaan potensi desa melaui BUMDes berbasis masyarakat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta kelesterian sumber-sumber potensi desa,

(4) Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat esa memiliki kesiapan dan komitmen peningkatan sumber daya manusia untuk mereplikasi pengelolaan sumber-sumber potensi desa,

(5) Pemerintah Desa memiliki komitmen mengalokasikan anggaran melalui APDBes setiap tahun anggaran serta bersama-sama membina dalam meningkattkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pembinaan tentang cara-cara pengelolaan BUMDes.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 10
Struktur Organisasi
Badan Usaha Milik Desa Aina Nefa

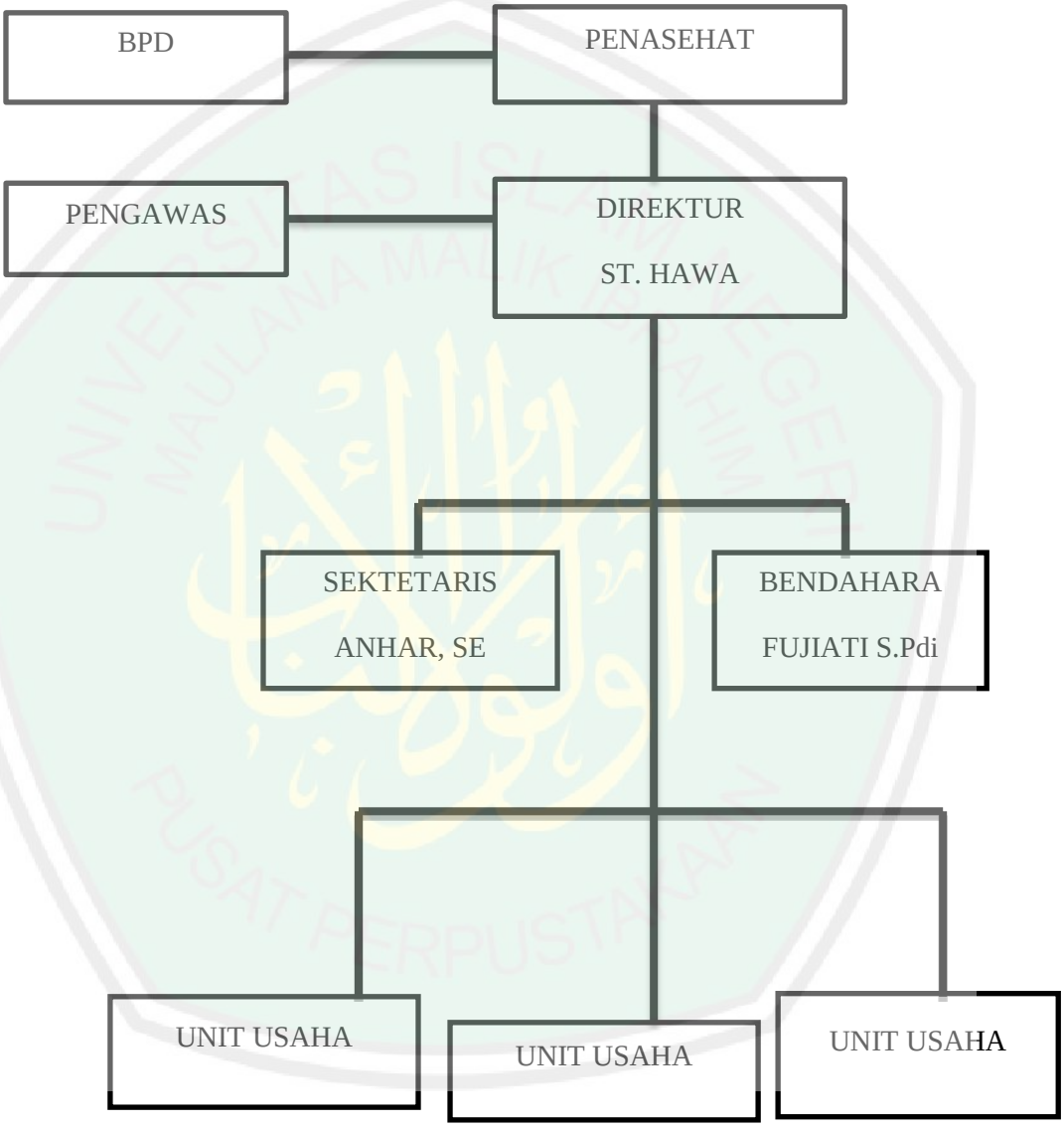

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

BUMDes AINA NEFA merupakan lembaga yang dikelola langsung oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, meningkat kan usaha, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk mensejahteraan masyarakatnya hingga mampu mengejar ketertinggalan.

a. Jumlah Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk desa Soki sesuai dengan kondisi yang ada di desa Soki, setiap tahun mengalami pertumbuhan sehingga kebutuhannya juga akan terus meningkatkan. Walaupun pertumbuhan penduduk semakin tertambah tidak seimbang dengan kondisi perekonomian desa hingga perlua ada pemerataan dari segala aspek mulai aspek ekonomi, sosial, dan politik dan lainnya. Maka perlu adanya pembangunan desa untuk menopang perekonomian masyarakat desa. Palagi desa mempunyai otonom sendiri untuk mengembangkan segala sumber daya alam yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga mencapai desa yang mandiri dan dapat mensejhterakan rakyatnya sesuai dengan sumber daya sumber manusia dan sumber alam yang di desa. Menurut jumlah Penduduk, Jumlah KK, Pendidikan dan Kesehatan sebagai mana pada tahun 2015/2016 table dibawah ini:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Jumlah penduduk

Penduduk (orang)	Tahun		% Perkembangan	
	2015	2016		
Laki – laki	843	866		
Perempuan	891	924		
Jumlah	1734	1790		

Sumber: RPJMDes ACC (Repaired) II

2) Jumlah keluarga

Kepala keluarga	Tahun		% Perkembangan	
	2015	2016		
Laki – laki	377	395		
Perempuan	69	73		
Jumlah	446	468		

Sumber: RPJMDes ACC (Repaired) II

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat desa Soki adalah mencari nafkah/memenuhi kebutuhannya sebagai petani khususnya petani bawang merah sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan sekitar serta sesuai potensi atau kemampuan masyarakat desa tersebut. Dari sini masyarakat dapat memenuhi pendapatan maupun kebutuhannya sesuai kemampuan masyarakat.Hanya minoritas masyarakatlajh yang bekerja sebagai Guru, Dosen, Wiraswasta, TNI, Polisi dan lainnya. Apalagi kondisi alam yang masih subur dan dari segi pendidikannya masyarakat desa Soki masih sangat rendah, sesuai kondisi sumber daya masyarakat maka pekerjaan yang cocok adalah bertani.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Kondisi Sosial Budaya

Secara social budaya kehidupan masyarakat masih memakai rumah panggung untuk berkumpul saling berinteraksi dengan baik sehingga hubungan antara satu dengan lainnya tetap saling terjaga. Karena masyarakat masih guyub antar warga satu dengan yang lainnya sehingga masyarakat terciptanya masyarakat sejahtera. Apalagi ada kegiatan yang berhuungan seperti Karang taruna, Kegiatan BUMDes, 17 Agustus 1945, MTQ tingkat desa, PKK, dan lainnya. Semua kegiatan ini yang pastinya akan melibatkan banyak warga sehingga semua masyarakat akan ikut berpartisipasi. Dari jumlah penduduk 3.524 orang penduduk yang beragama Islam hampir 100%. Kondisi Budaya Secara sosial masyarakat desa masih guyub, tentram, damai, dan sejahtera. Hubungan antara warga satu dengan warga lainnya masih terjalin dengan baik apalagi kalau ada kegiatan desa maupun kegiatan warga lainnya mereka saling tolong menolong dan gotong royong untuk kegiatan dalam masyarakatnya. Kondisi kehidupan beragama masih sangat baik, rukun, tenang, damai, tentram dan sejahtera. Saling menghormati dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai permaslahan yang ada di masyrakat maupun di luar masyarakat. Contoh: Musibah kematian, Kecelakaan, Gotong royo.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Kondisi Lingkungan Alam

Di lingkungan alam masih sangat hijau dengan kondisi lingkungan sekitar yang masih asri seperti :

1) Keadaan lingkungan masih bersih

2) Lahan pekarangan rumah dan halaman masih luas

3) Keadaan sampah masih terjaga

4) Tumbuh-tumbuhan masih hijaiu menghiasi alam sekitar desa

5) Gunung-gunung masih hijau menampakan keindaham alamnya masih asri

5. Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

a. Masyarakat menganggap bahwa dana Bumdes masih dianggap uang cuma-cuma

Masyarakat awam ada yang belum memahami tentang dana BUMDes apalagi belum ada sosialisasi tentang BUMDes, Dana Desa, dan Dana BUMDes. Hingga masih ada banyak sebagian masyarakat yang menganggap dana Bumdes hanya dana cuma-cuma yang memang mereka anggap uang tersebut adalah uang masyarakat yang mereka terima tanpa harus di kembali lagi oleh mereka kepada pengurus Bumdes hingga dana simpan pinjam dalam program Bumdes sedikit terhambat. karena dana yang diperuntukkan kepada masyarakat secara bergulir namun masih belum berjalan dengan baik. Meskipun masih banyak sebagian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat yang menganggap Dana BUMDes untuk mereka bukan untuk digulirkan di masyarakat mengalami kemacetan tapi karena kerja keras pengurus BUMDes Seperti yang dipaparkan oleh kepala BUMDes AINA NEFA Ibu Siti hawa sebagai berikut.

> "Kendala paling besar yang kami di SPP ini hadapi adalah Kendala asumsi masyarakat ketika kita berikan uang pinjaman yang tidak berasal dari siapa yang jelasnya mandek, macet yang anggapannya adalah uang pemerintah."[99]

Melihat kendala dalam menjalankan program simpan pinjam (SPP) pengurus BUMDes berusaha keras menjelaskan kepada masyarakat hingga mau bekerja sama dan saling menguntungkan serta mau membayar uang pinjaman kembali untuk modal usaha simpan pinjam untuk di gulirkan lagi ke masyarakat kembali. Dengan kondisi seperti pengurus juga mengambil inisiatif untuk membuka program serta melihat keperluan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lingkungan alam. Pengurus membuat program baru yaitu berdagang obat-obatan petani bawang merah.

b. Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah

Serta yang menjadi hambatan pengurus desa dan pengurus Bumdes kurangnya sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, dan berpendidikan akan memperlambat kemajuan perkembangan Bumdes karena perkembangan Bumdes lain di setiap desa akan terus mangalami kemajuan yang sangat baik karena sumber daya manusia yang bernilai tinggi akan mendukung perkembangan

[99] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti hawa Ketua BUMDes AINA NEFA, di rumah Ibu Siti hawa, Hari Rabu 9 November 2017, Jam 12.20 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu program kegiatan Bumdes untuk menopang peningkatan pendapatan Bumdes.

> "Kalau anggotanya ya alhamdulillah udah aman-aman saja cuman sekarang, kenapa Bumdes sekarang ini mau ganti yang pertama pengurus saya sudah nikah dan keluar daerah dan akhirnya saya sendiri. Jadi saya kemarin di panggil oleh pemerintah desa, dan ditanyakan kesiapan saya dan saya gk mungkin bekerja sendiri tanpa ada pengurus yang lain karena saya juga tidak siap lagi untuk pegang Bumdes. Sehingga saya izinkan untuk merekrut kembali anggota Bumdes. Karena Bumdes pada tahun 2016 ini tidak gampang seperti tahun yang kemarin. Bumdes yang lahir pada tahun 2014 dan 2015 itu Bumdes lahir belum ada Perdes sebagai payungnya dan kita laksanakan belum diterbitkan AD/ART namun itu perintah pusat bahwa Bumdes di tahun 2016-2017 sekarang ini harus berdasarkan perdes oleh karena itu kemarin BPD bersama pemerintah desa melakukan rapat untuk merumuskan perdes itu bersama AD/ART nah, panitia telah terpilih kemarin kalau gk salah di bulan 9 sudah terpilih tapi sekarang kerja panitia untuk melakukan perekrutan anggota Bumdes itu belum ada. Oleh karena itu, untuk pengurus baru Bumdes itu belum ada karena apa ? karena Bumdes di tahun 2016 sekarang ini tidak sama yang di 2014 dan 2015 susunan kepengurusan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara tapi sekarang ini."[100]

Mengamati hasil paparan Kepala BUMDes AINA NEFA Ibu siti hawa bahwa selama pelaksanaan program-program masih kekurangan pengurus seperti salah-satu Bendahara BUMDes yang sudah menikah tidak lagi menetap di desa Soki sehingga

[100] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti hawa Ketua BUMDes AINA NEFA, di rumah Ibu Siti hawa, Hari Rabu 9 November 2017, Jam 12.20 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaksanaan segala kegiatan BUMDes sedikit mengalami hambatan. Walaupun sudah diambil alih oleh staf desa tetap saja ada hambatan yang dalam pelaksanaan kegiatan program maupun pengelolaan dana BUMDes AINA NEFA karena tidak saja bendahara yang vakum dalam kepengurusannya tapi sekretaris juga.

c. Belum Ada Sosialisasi BUMDes dan Dana BUMDes

Salah-satu kendala dalam menjalankan kegiatan program BUMDes AINA NEFA belum ada sosialisasi tentang BUMDes hingga pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan BUMDes masyarakat masih kurang antusias dan bahkan ada yang belum tahu tentang BUMDes. Sehingga salah-satu program BUMDes AINA NEFA simpan pinjam (SPP) mengalami kendala karena kurang pamahaman masyarakat tentang BUMDes itu sendiri. Sesuai yang di paparkan oleh Kepala BUMDes AINA NEFA Iu Siti hawa sebagai berikut.

> "Belum ada sosialisasi khusus untuk pelaksanaan kegiatan program BUMDes tapi ada musyawarah segala pelaksanaan tentang peraturan desa mengenai pelaksanaan BUMDes maupun mengenai kepengurusan BUMDes."[101]

Belum adanya sosialisasi tentang pelaksanaan BUMDes maupun pengelolaannya bahkan tentang BUMDes sendiri masyarakat desa Soki tidak mengetahui hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang BUMDes di desa Soki. Sehingga masih kurang optimalnya dalam pelaksanaan BUMDes sedangkan dalam pelaksanaannya peran masyarakat desa sangat urgen karena merekalah yang akan melaksanakan, mengelola dan mengembangkan BUMDes untuk terus maju sehingga dapat mengikuti perkembangan BUMDes yang sudah maju memiliki pendaptan yang sangat meningkat seperti di Lombok Tengah.

[101] Hasil Wawancara dengan Ibu Rohana Staf Desa Soki, di rumah Ibu Rohana, Hari Kamis 21 Desember 2017, Jam 15.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara/interview, observasi, serta dokumentasi maka selajutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari penelitian.

Sesuai dengan analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisa studi kasus dengan suatu kajian peristiwa yang mendalam di lingkungan, dan kondisi yang memungkinkan mengungkapkan dan memahami peristiwa suatu yang berkiatan dengan program atau eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga mampu mengeluarkan mangatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir Eksistensi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima masih terus mengalami perkembangan hingga mencapai kemajuan pesat seperti BUMDes yang ada di Terara di Lombok Tengah sehingga mencapai pendapatan sampai milyaran. Dilihat dari program-program yang sudah berjalan seperti simpan pinjam (SPP), Pengolahan Air Bersih, dan perdagangan obat-obatan, meskipun masih ada beberapa yang masih perlu diperbaiki program maupun pengurus BUMDes dari segi masalah internal maupun eksternal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tuntunan hukum dari Peraturan Desa (Perdes) di tingkat daerah tentang pengelolaan BUMDes terlambat di buat di karena pemerintah daerah belum membentuk Perdes walaupun mengacu pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 2016 tersebut belum secara rinci menjelaskan tentang pengelolaan BUMDes sehingga perkembangan maupun pengelolaan BUMDes akan lambat.

Sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDes ini secara kualitas masih sangat kurang karena sesuai penetapan pengurus rektur BUMDes hanya mengambil satu tanggung jawab pada setiap unit usaha atau jabatan . Dari segi kualitas, sumber daya yang ada tidak terlalu paham tentang teknologi IT karena dari segi pendidiknya yang masih rendah sehingga semua pembukuan masih secara manual.

Data yang telah diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti maka akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.

1. Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes AINA NEFA merupakan untuk pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dari seluruh aspek masyrakat karena tidak saja pemerintah yang akan membangun perekonomian masyarakat desa tetapi masyarakat harus juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri harus berperan aktif karena untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah masyarakat yang paling utama untuk mengerak atau mengarahkan seluruh peleksanaan kegiatan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan BUMDes. Dimana pemerintah mengarahkan pelaksanakan kegiatan BUMDes serta membina masyarakat untuk meningkatkan potensi dan skill untuk mengembangkan program-program yang akan di laksanakan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi desa.

2. Pelaksanaan BUMDes

Program BUMDes AINA NEFA merupakan program pembangunan yang berbasis pada pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dapat di kelola dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakatnya, pemerintah dapat menunjang dengan memperbaiki sarana dan prasana yang di butuhkan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga semua tatanan yang ada di pemerintah desa serta masyarakat akan berkontribusi untuk melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akan akan di laksanakan.

Pelaksanaan program BUMDes AINA NEFA dalam membangun perekonomian desa, dimana desa mampu dapat mengelola sumber daya yang ada untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana para pengurus BUMDes mampu menjalin kerja sama antar lembaga yang berkaitan untuk memperluas mitra kerja antar desa, kecamatan, kabupaten dan kota. Dengan adanya BUMDes juga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran warga yang ada di desa.

BUMDes AINA NEFA merupakan lembaga yang ada di tingkat desa yang dikelola oleh masyarakat yang segala kegiatannya pelaksanaan dan pengelolaan mempunyai wewenang tersendiri tidak bercampur dengan pemerintah desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dimana dalam kepengurusan BUMDes tidak saja pengurus yang akan melaksanakan segala kegiatannya tetapi masyarakat juga mempunyai peran yang sangat fital. Karena sumber daya manusia adalah sumber utama yang akan menjalan sebuah lembaga yang akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga segala potensi yang ada di desa akan di kelola oleh masyarakat untuk masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pelaksanaan pembangunan pendesaan yang dilakukan BUMDes AINA NEFA mengerakkan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat desa untuk menuju pembangunan yang daerah yang kokoh hingga menuju pembangunan nasional. Untuk menuju pembangunan ini tidak saja masyarakat yang berperan aktif tapi pemerintahan desa dan seluruh relawan dalam proses pembangunan desa.

Pelaksanaan program pembangunan menggunakan partisipatif seperti BUMDes AINA NEFA dimana masyarakat desa akan mengelola segala kegiatan langsung dari sini juga masyarakat yang mempunyai skill akan di kembangkan untuk memenuhi masyarakat sebagian kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan menunjukkan proses yang memperbaiki dari seluruh sistem ekonomi maupun sistem sosial. Pembangunan desa untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat dari kondisi masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju kesejahteraan. Tahapan yang dilakukan masyarakat desa dalam menghadapi pembangunan ialah mengkordinir diri sendiri dan membangun suatu lembaga yang partisipatif sebagai kerjasama dari masyarakat karena bantuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diberikan BUMDes sebagai modal masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat dan desa tersebut untuk lebih mandiri.

Cavage (n.d) mengatakan beberapa elemen dalam keberhasilan pengembangan masyarakat yaitu: kerjasama, kemauan, kepemimpinan, kerja keras dan organisasi yang terbina.[102] Faktor lain yang menentukan keberhasilan pemberdayaan adalah semangat dan kemampuan masyarakat. Karena pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, maka keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung respon, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat.[103]

Percepatan pembangunan diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada satuan wilayah pengembangan. Pembangunan berbasis wilayah ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara wilayah, lebih dari itu pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran.[104]

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan melalui BUMDes sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa dapat mendirikan sebuah lembaga sesuai potensi dan kondisi masyarakat desa. Dimana dalam pemberdayaan masyarakat pembangunan dalam suatu daerah harus

[102]Wignyo Adiyoso. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 25
[103]Ibid
[104]Samugyo Ibnu Redjo, Strategi dan Aksi Pecepatan Pembangunan Daerah, hlm. 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyeluruh di segala aspek dimana antara aspek yang lain harus saling mengikuti karena kemajuan suatu daerah tidak hanya dari satu segi saja.

Melakukan kerjasama antar BUMDes dengan baik, maupun kerjasama dengan perusahaan, dan segala bidang pengembangan lainnya. Sehingga dapat menambah modal maupun melakukan pengembangan program BUMDes hingga terjalin kerjasama yang baik. Serta mengamati pengelolaan BUMDes yang sudah maju.

Meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang teratur dan sistematis sehingga berkembang dengan baik. Sehingga data yangpenting tidak tersimpan dengan baik sehingga saatdi butuhkanmudah di ambil dalam membuat segala laporan tanggung jawab tentang BUMDes.

3. Strategi Pengelolaan

Pengelolaan BUMDes telah diatur sesuai Permendesa No.4/2015 mengtur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dan masing-masing perangkap BUMDes. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes harus di kelola secara profesional dan mandiri sehingga memerlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan Pengurus atau Kepala BUMDes harus di sesuaikan dengan standart yang telah di tetapkan AD/ART BUMDes. Karena di BUMDes AINA NEFA masih sangat minim sumber daya manusia sehingga pelaksanaan belum bisa maksimal, dimana SDM adalah salah-satu pondasi untuk meningkatkan mutu atau kemajuan suatu lemabaga agar lebih berkembang dengan baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pelaksanaan BUMDes yang pertama pengurus desa untuk membentukn Peraturan Desa hingga pelaksanaan BUMDes AINA NEFA bisa mangatur pelaksanaan, pengelolaan, dan mengukur perkembangan BUMDes setiap tahap kegiatan akan mengalami kemajuan atau hanya tidak ada perkembangan untuk masyaraka desa, pengurus BUMDes, dan pemerintah desa.

Pembentukan lembaga desa dalam musyawarah di perlukan acuan sehingga harus membentuk suatu aturan-aturan untuk mengatur lembaga tersebut, maka dari itu pengurus desa merumuskan Peraturan Desa dapat yang menuntun berdiri BUMDes AINA NEFA maupun segala pelaksanaan kegiatan yang dapat akan di laksanakan selama periode-periode tertentu.

Hasil dari musyawarah masyarakat desa dengan pemerintah desa lahirlah Peraturan Desa untuk jadi pedoman pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, segala pengelolaan harus sesuai dengan Peraturan Desa Soki Nomor 03 Tahun 2017 sebelum adanya Perdes BUMDes yang di turunkan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun meningkatkan pendapatan masyarakat atau penghasilan desa. BUMDes AINA NEFA merangkul semua elemen masyarakat tidak sekedar objek tetapi juga sebagai mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan . Dengan pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyrakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat ketahui potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat desa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pelaksanaan program pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat sangat di perlukan untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dari seluruh aspek di berbagai bidang di masyarakat itu sendiri serta menuntut pemerintah daerah untuk sealalu dalam proses pembangunan suatu daerah.

Perkembangan pendekatan Pembangunan Desa Terpadu yang sudah diuraikan, dapat dilihat bahas integrasi dalam pendekatan ini di mulai dari berbagai aspek terkait dalam ruang lingkup yang lebih sempit, kemudian sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangannya dibutuhkan integrasi antar aspek-aspek terkait antar ruang lingkup yang lebih luas. Secara kronologis hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini:

a) Pada mulanya diawali dengan program pembangunan pertanian yang memperkenalkan berbagai ide baru dalam sistem usaha tani guna meningkatkan produktivitas per satuan luas.
b) Agar petani lebih responsif terhadap ide-ide baru yang diperkenalkan, maka penyuluhan pertanian perlu di integrasikan dengan program yang memberikan kemudahan memperoleh sarana produksi yang di perkenalkan, fasilitas kredit dan pemasaran.
c) Peningkatan produktivitas pertanian tidak selalu otomatis berarti peningkatan pendapatan rata-rata, apabila peningkatan produktivitas tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Akhirnya, agar lebih menjamin pemerataan dalam pendapatan sebagai manfaat yang diperoleh dari program tersebut, dibutuhkan integrasi antar berbagai aspek yang lebih luas.

Eksistensi adalah suatu beradaan yang akan memberikan dampak yang baik/buruk, dimana masyarakat mempunyai wadah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, mapun kemampuan sesuai dengan kondisi dan potensi yang mereka miliki tidak terkunkung atau terhambat karena tidak mempunyai wadah untuk mengembang segala keahliannya. Disinilah pemerintah menyediakan wadah untuk masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 213 Ayat 1 "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Dapat dilihat pemerintah menyediakan sarana untuk masyarakat desa sehingga dapat membangun perekonomian serta meningkat pendapatan masyarakat dengan adanya BUMDes AINA NEFA.

Eksistensi dengan adanya BUMDes sangat terlihat dari masyarakat desa Soki memberikan dampak sebagai berikut, seperti 1) kondisi ekonomi 2) kondisi sosial 3) kondisi budaya 4) kondisi lingkungan.

Batas wilayah pada umumnya digunakan batas administrasi, misalnya, kabupaten, kecamatan, dan propinsi dan sebagainya. Dalam penelitian eksistensi BUMDes desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang menggunakan batas administrasi sebagai batas wilayah. Hingga kini belum adakesepakatan para ahli dalam menentukan batas wilayah waktu tersebut. Sebagaimana contoh Badan Pusat Stastik (BPS) dalam melaksanakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sensus penduduk Indonesia menggunnakan batas propinsi sebagai batas wilayah sedangkan batas waktu digunakan atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan .[105]Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat inherennya).[106]Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007) eksistensi adalah : "Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada.

Sebagai salah-satu strategi pembangunan masyarakat, di negara-negara sedang berkembang *community development* sudah mulai dilaksanakan sejak negara-negara tersebut masih berada dalam masa penjajahan. Sudah barang tentu hal ini juga lebih banyak merupakan perluasan dari penerapan *community development* yang sudah di lakukan dalam masyarakat negara penjajahannya.[107]

Secara garis besar, tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peninkgatan taraf hidup manusia.[108]

[105] Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[106] Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hlm. 183
[107] Soetomo. *Pembangunan Masyarakat*. (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2006) Hlm. 96
[108] Soetomo. *Pembangunan Masyarakat*. (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2006) Hlm. 162

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Oleh sebab itu, dengan adanya BUMDes di desa Soki membawa dampak bagi kehidupan di masyarakat sekitar, khususnya Desa Soki Kecamatan Belo. Berikut dampak yang di sebabkan oleh BUMDes AINA NEFA sebagai berikut.

1) Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat desa Soki adalah mencari nafkah/memenuhi kebutuhannya sebagai petani khususnya petani bawang merah sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan sekitar serta sesuai potensi atau kemampuan masyarakat desa tersebut. dari sini masyarakat dapat memenuhi pendapatan maupun kebutuhan. Hanya minoritas masyarakat yang bekerja sebagai Guru, Dosen, Wiraswasta, TNI, Polisi dan lainnya.

Secara garis besarmasyarakat desa Soki mencari nafkah/memenuhi kebutuhannya sebagai petani bawang merah sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan sekitar serta sesuai potensi atau kemampuan masyarakat desa tersebut. Dari sini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan atau pendapatannya maupun kebutuhannya.

2) Kondisi Sosial Budaya

Secara sosial budaya kehidupan masyarakat masih memakai rumah panggung untuk berkumpul saling berinteraksi dengan baik sehingga hubungan antara satu dengan lainnya tetap saling terjaga. Karena masyarakat masih guyub antar warga satu dengan yang lainnya sehingga masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terciptanya masyarakat sejahtera. Apalagi ada kegiatan yang berhuungan seperti Karang taruna, Kegiatan BUMDes, 17 Agustus 1945, MTQ tingkat desa, PKK, dan lainnya. Semua kegiatan ini yang pastinya akan melibatkan banyak warga sehingga semua masyarakat akan ikut berpartisipasi. Dari jumlah penduduk 3.524 orang penduduk yang beragama Islam hampir 100%. Kondisi Budaya Secara sosial masyarakat desa masih guyub, tentram, damai, dan sejahtera. Hubungan antara warga satu dengan warga lainnya masih terjalin dengan baik apalagi kalau ada kegiatan desa maupun kegiatan warga lainnya mereka saling tolong menolong dan gotong royong untuk kegiatan dalam masyarakatnya.Kondisi kehidupan beragama masih sangat baik, rukun, tenang, damai, tentram dan sejahtera. Saling menghormati dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai permaslahan yang ada di masyrakat maupun di luar masyarakat. Contoh: Musibah kematian, Kecelakaan, Gotong royo.

Secara sosial masyarakat desa masih guyub, tentram, damai, dan sejahtera. Hubungan antara warga satu dengan warga lainnya masih terjalin dengan baik apalagi kalau ada kegiatan desa maupun kegiatan warga lainnya mereka saling tolong menolong dan gotong royong untuk kegiatan dalam masyarakatnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Kondisi Lingkungan Alam

Di lingkungan alam masih sangat hijau dengan kondisi lingkungan sekitar yang masih asri seperti :

a) Keadaan lingkungan masih bersih
b) Lahan pekarangan rumah dan halaman masih luas
c) Keadaan sampah masih terjaga
d) Tumbuh-tumbuhan masih hijaiu menghiasi alam sekitar desa
e) Gunung-gunung masih hijau menampakan keindaham alamnya masih asri.

2. Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyrakat Desa Soki

a. Masyarakat menganggap bahwa dana Bumdes masih dianggap uang cuma-cuma

Masyarakat awam ada yang belum memahami tentang dana BUMDes apalagi belum ada sosialisasi tentang BUMDes, Dana Desa, dan Dana BUMDes. Hingga masih ada banyak sebagian masyarakat yang menganggap dana Bumdes hanya dana cuma-cuma yang memang mereka anggap uang tersebut adalah uang masyarakat yang mereka terima tanpa harus di kembali lagi oleh mereka kepada pengurus Bumdes hingga dana simpan pinjam dalam program Bumdes sedikit terhambat. karena dana yang diperuntukkan kepada masyarakat secara bergulir namun masih belum berjalan dengan baik. Meskipun masih banyak sebagian masyarakat yang menganggap Dana BUMDes untuk mereka bukan untuk digulirkan di masyarakat mengalami kemacetan tapi karena kerja keras pengurus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUMDes Seperti yang dipaparkan oleh kepala BUMDes AINA NEFA Ibu Siti hawa sebagai berikut.

Melihat kendala dalam menjalankan program simpan pinjam (SPP) pengurus BUMDes berusaha keras menjelaskan kepada masyarakat hingga mau bekerja sama dan saling menguntungkan serta mau membayar uang pinjaman kembali untuk modal usaha simpan pinjam untuk di gulirkan lagi ke masyarakat kembali. Dengan kondisi seperti pengurus juga mengambil inisiatif untuk membuka program serta melihat keperluan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lingkungan alam. Pengurus membuat program baru yaitu berdagang obat-obatan petani bawang merah.

b. Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah

Salah-satu hambatan pengurus desa dan pengurus Bumdes kurangnya sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, dan berpendidikan akan memperlambat kemajuan perkembangan Bumdes karena perkembangan Bumdes lain di setiap desa akan terus mangalami kemajuan yang sangat baik karena sumber daya manusia yang bernilai tinggi akan mendukung perkembangan suatu program kegiatan Bumdes untuk menopang peningkatan pendapatan Bumdes.

Mengamati hasil paparan Kepala BUMDes AINA NEFA Ibu siti hawa bahwa selama pelaksanaan program-program masih kekurangan pengurus seperti salah-satu Bendahara BUMDes yang sudah menikah tidak lagi menetap di desa Soki sehingga pelaksanaan segala kegiatan BUMDes sedikit mengalami hambatan. Walaupun sudah diambil alih oleh staf desa tetap saja ada hambatan yang dalam pelaksanaan kegiatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

program maupun pengelolaan dana BUMDes AINA NEFA karena tidak saja bendahara yang vakum dalam kepengurusannya tapi sekretaris juga.

c. Belum Ada Sosialisasi BUMDes dan Dana BUMDes

Salah-satu kendala dalam menjalankan kegiatan program BUMDes AINA NEFA belum ada sosialisasi tentang BUMDes hingga pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan BUMDes masyarakat masih kurang antusias dan bahkan ada yang belum tahu tentang BUMDes. Sehingga salah-satu program BUMDes AINA NEFA simpan pinjam (SPP) mengalami kendala karena kurang pamahaman masyarakat tentang BUMDes itu sendiri.

d. Kurangnya Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial yang ada belum memenuhi dalam pengelolaan BUMDes, hal ini di karenakan dana yang dikeluarkan pemerintah daerah masih kurang cukup tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada para pengelolaan berharap dana yang keluarkan lagi sesuai dengan jumlah masyarakatnya sehingga mampu memperdaya masyarakat dengan lebih baik lagi serta menambah fasilitas yang ada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan administrasi belum di kelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peniliti kesulitan dalam mendapatkan data salah-satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes.
2. Kurangnya komunikasi yang di lakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDes. Dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus desa dengan para pengelola BUMDes sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja.
3. Kurang sosialiasi program BUMDes ini baik sosialisasi pemerintah daerah ke desa-desa mengenai kebiajakan BŪMDes sosialisasi maupu pemerintahh desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang di jalankan desa Soki sehingga masyarakat tidak banyak mengenai tentang pelaksanaan BUMDes.
4. BUMDes AINA NEFA Membantu masyarakat desa sebagian besar khususnya untuk keluarga pra sejahtera/tidak mampu untuk membuka usaha, menambah modal petani bawang dan padi dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yang sebagai berikut :

1. Melakukan rekrutment kembali pengurus BUMDes AINA NEFA dengan menganti pengurus lama serta melihat keahlian dibidangnya maupun menambah staff pembantu pengurus agar pekerjaan yang ada supaya tidak terbengkalai karena kekurangan pengurus.
2. Memperkuat atau meningkatkan komunikasi antar pengurus maupun antar lembaga desa dengan melakukan pertemuan rutin mingguan, bulanan, bahkan tahunan untuk membahas pengelolaan BUMDes sehingga dapat di ketahui perkembangan BUMDes di desa Soki setiap bulan atautahun apakah mengalami kemajuan serta di ketahui segala pihak.
3. Melakukan sosialisasi di masyarakat di desa Soki tentang BUMDes agar tidak ada kesalahpahaman antar pengurus desa/pengurus BUMDes dengan masyarakat tentang pelaksanaan program BUMDes maupun segala tentang pengelolaannya.
4. Supaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Soki BUMDes harus ada pemasukan desa Soki hingga keberadaan BUMDes AINA NEFA lebih berdampak sebagai badan usaha masyarakat desa Soki.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Memilih pengurus BUMDes sesuai dengan potensi yang di butuhkan, bukan melakukan nepotisme karena keluarga, kerabat dekat, teman maupun lainnya sehingga dalam adanya kecemburuan sosial.
6. Pemerintah tidak harus memilih masyarakat desa Soki yang mendapat bantuan dana BUMDes karena keluarga, kerabat dekat, teman dan lainnya. Sehingga deskriminasi terhadap masyarakat yang benar-benar membutuh bantuan pemerintah.
7. Agar meningkatkan pendapatan BUMDes agar pemasukan untuk kas desa Soki sehingga eksistensi BUMDes AINA NEFA Soki lebih meningkatkan lagi perekonomian masyarakat desa Soki.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RUJUKAN

Hamiati dan Abdul Aziz Zulhakim, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi* ASEAN, Artikel, UniHaz Bengkulu.

Gabriela Hanny Kususma dan Nurul Purnamasari. 2016. *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan.* Jogjakarta; Penabulu Fundation.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Bahreint T. Sugihen, *Sosiologi Pendesaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

Suhana, *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penyelanggaraan Pemerintah*, Artikel E-Journal, TanjungPinang. 2014.

Departemen Pendidikan Nasional Pisat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).

Ahmad Erani Yustika. 2013. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta; Penerbit Erlangga.*

Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Pabundu Tika. 2005. *Metodologi Penelitian Geografi*. Jakarta : Bumi Aksara

Nusa Putra. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS.*Bandung.PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Idrus.2009. *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL.*Yogyakarta : Erlangga

Imam Suprayogo dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*.Bandung :PT Remaja Rosdakarya

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar – dasar *Penelitian.* (Surabaya: eLKAF, 2006).

Sugiyono. *2015. Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung : CV Alfabeta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Emi Haryati, "*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*", ejornal Ilmu Pemerintah.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Modul Pegangan Peserta Pelatihan Bagi Pelatih Manajemen Pemerintah Desa*.

Direktoral Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Tanya Wajab Seputar Undang-Undang Tentang Desa.* Jakarta Selatan; Kementrian Desa, Pembangunan Desa, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Samugyo Ibnu Redjo, "Strategi dan Aksi Pecepatan Pembangunan Daerah", Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. (Jakarta; PT Pustka LP3ES Indonesia, 1994).

Afriniko. *Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal. JOM Fakultass Hukum. Pekanbaru. 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

Lampiran Izin Penelitian dari Fakultas Tarbiyah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
http:// fitk.uin-malang.ac.id. email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 3675/Un.03.1/TL.00.1/12/2017 — 08 Desember 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima
di
Bima

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	:	Nofiratullah
NIM	:	14130051
Jurusan	:	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester - Tahun Akademik	:	Ganjil - 2017/2018
Judul Skripsi	:	**Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonmomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima**
Lama Penelitian	:	**Desember 2017** sampai dengan **Februari 2018** (3 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :
1. Yth. Dekan sebagai Laporan
2. Yth. Ketua Jurusan PIPS
3. Arsip

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN BELO
KANTOR DESA SOKI
Alamat: Jln. Lintas Tente Karumbu Belo Bima

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 423.6 /383/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima menerangkan dengan sesungguhnya kepada

Nama : Abas Muhamad
NIP : 20160801 1972 4 7 1
Jabatan : Kepala Desa Soki Kecamatan Belo Bima

Menerangkan Bahwa :
Nama : Nahratullah
Tempat Tanggal Lahir : Ncah 16 Juni 1995
NIM : 1113054
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Judul Skripsi : Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima

Bahwa yang bersangkutan tersebut namanya diatas benar-benar telah Melaksanakan penelitian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima mulai tanggal 15 Desember s/d tanggal 31 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soki, 08 Mei 2018
Kepala Desa Soki

Abas Muhamad
NIP. 20160801 1972 4 7 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 3 Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JALAN GAJAYANA 50 MALANG, TELEPON 0341-552398, FAKSIMILE 0341-552398

Bukti Konsultasi Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa : Nofiratullah

NIM : 14130051

Jurusan/Fakultas : PIPS/Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dosen Pembimbing : Ni'matuz Zuhroh, M. Pd

Judul Skripsi : Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima

No	Tanggal	Hal Di Konsultasikan	Paraf
1.	15 Desember 2017	Pedoman Wawancara	1.
2.	3 April 2018	Bab IV	2.
3.	18 April 2018	ACC Bab IV	3.
4.	9 Mei 2018	Bab V	4.
5.	14 Mei 2018	ACC Bab V	5.
6.	17 Mei 2018	Bab VI	6.
7.	18 Mei 2018	ACC Abstrak	7.
8.	21 Mei 2018	ACC Bab I-VI	8.

Malang, 21 Mei 2018
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA
NIP. 19710701 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA

1. Sejarah Bumdes di desa Soki
2. Kapan Bumdes aktif di desa Soki
3. Berapa dana, berasal dari mana dan dananya untuk keperluan apa saja
4. Apa saja program dan kegiatan Bumdes di Desa Soki
5. Apa saja kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan kegiatan Bumdes
6. Apa saja kendala masyarakat yang dihadapi dalam kegiatan Bumdes
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bumdes
8. Apakah sudah ada kerjasama antar desa khususnya mengenai Bumdes

MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Bumdes
2. Bagaimana partisipasi bapak/ibu dalam kegitan Bumdes
3. Apakah bapak/ibu mengetahui semua program yang ada di Bumdes
4. Apa saja program Bumdes yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Apa saja kegiatan yang ada di Bumdes membantu permasalahan masyarakat khususnya keuangan

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

1. Apa saja program yang ada di Bumdes
2. Apa saja kendala dalam kegiatan Bumdes
3. Bagaimana pengurus mengatasi permasalahan dalam kegiatan Bumdes
4. Bagaimana kerjasama Bumdes di desa Soki dengan Bumdes lain yang ada di kecamatan Belo
5. Apa saja bentuk kerjasama Bumdes di desa Soki dengan Bumdes lain yang ada di kecamatan Belo
6. Bagaimana pembuatan struktur pengurus Bumdes di desa Soki
7. Siapa saja anggota Bumdes di desa Soki
8. Apa saja 123sset Bumdes di desa Soki dan bergerak dibidang apa saja
9. Bagaimana implikasi kegiatan Bumdes terhadap perekonomian masyarakat desa Soki

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 5 Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

(Kepala Bumdes Desa Soki Siti Hawa Masa Jabatan 2014-2017)

1. Sejarah Bumdes di desa Soki

   Lahir Bumdes di desa Soki tahun 2014 dengan anggaran 30.000.000, pada tahun 2014 itu kami mengelola anggaran yang didapatkan dari propoinsi sebagai hadiah juara 2 lomba desa , kemudian yang kedua ditahun 2015 kami mendapatkan anggaran juga dari ADD senilai 25.000.000. Alhamdulillah, berkembang dengan baik. Kemudian adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes di Simpan Pinjam (SPP) kepada masyarakat yang diberikan kepada jenis usaha misalnya usaha bakulan, kios. 2016 dan 2017 dana belum dicairkan, karena ada pergantian pengurus. Untuk anggaran 2014-2015 itu hanya di simpan pinjam kemudian rencananya ke depan Bumdes itu di adakan perubahan yang mana simpan pinjam itu antara lain kemudian pengadaan kebutuhan petani sesuai kebutuhan petani seperti obat-obatan dan sebagainya. Simpan pinjam obat-obatan itu kita jual misalnya kelompok mengajukan kepada Bumdes, apa kebutuhannya misalnya kelompok petani yang ini mengajukan ke Bumdes itu obat-obatan bawang atau pupuk dan lain sebagainya. Jadi Bumdes itu menyiapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, adapun cara mereka pengembalian dan pembayaran kita pakai musiman misalnya petani mengajukan pinjaman kebutuhan petaninya di musim pertama dia mengembalikan berapa dulu. Kemudian di musim kedua dia membayar lagi dimusim ketiga. Jadi, kita pakai musiman.
2. Berapa persen bunga simpan pinjam ?

   20%

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Kendala dalam menjalan kegiatan Bumdes ?

   Ada aja kendala macet tapi gk terlalu macetnya karena memang Bumdes 2014-2015 berjalan aman, administrasi juga bagus sehingga tahun ini di 2017 kemarin pada bulan 8 kalau gk salah pengurus Bumdes ketuanya saya termasuk kepala desa di panggil untuk diklat di Mataram Propinsi di PPMDES. Dan alhamdulillah, kami mendapatkan hadiah dana 100.000.000 juta hari ini sedang dilakukan pencairan di Propinsi oleh kepala desa diberi hadiah karena Bumdes Soki pergembangannya bagus sehingga kami mendapatkan hadiah dari kementrian pemberdayaan di pusat 100.000.000. Itu tahun 2017, itu mendapatkan itu di kabupaten Bima hanya lima desa di Belo itu diwakili oleh Soki.

4. Kendala dari masyarakat itu sendiri bagaimana bu ?

   Kalau anggotanya ya alhamdulillah udah aman-aman saja cuman sekarang, kenapa Bumdes sekarang ini mau ganti yang pertama pengurus saya sudah nikah dan keluar daerah dan akhirnya saya sendiri. Jadi saya kemarin di panggil oleh pemerintah desa, dan ditanyakan kesiapan saya dan saya gk mungkin bekerja sendiri tanpa ada pengurus yang lain karena saya juga tidak siap lagi untuk pegang Bumdes. Sehingga saya izinkan untuk merekrut kembali anggota Bumdes. Karena Bumdes pada tahun 2016 ini tidak gampang seperti tahun yang kemarin. Bumdes yang lahir pada tahun 2014 dan 2015 itu Bumdes lahir belum ada Perdes sebagai payungnya dan kita laksanakan belum diterbitkan AD/ART namun itu perintah pusat bahwa Bumdes di tahun 2016-2017 sekarang ini harus berdasarkan perdes oleh karena itu kemarin BPD bersama pemerintah desa melakukan rapat untuk merumuskan perdes itu bersama AD/ART nah, panitia telah terpilih kemarin kalau gk salah di bulan 9 sudah terpilih tapi sekarang kerja panitia untuk melakukan perekrutan anggota Bumdes itu belum ada. Oleh karena itu, untuk pengurus baru Bumdes itu belum ada karena apa ? karena Bumdes di tahun 2016 sekarang ini tidak sama yang di 2014 dan 2015 susunan kepengurusan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara tapi sekarang ini. Bumdes di tahun 2016 harus ada di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rekturnya, direksi kemudian kepala unit dan aturannya seperti PNPM. Kalau yang lalu masi pakai susunan pengurusan ketua, sekretaris, dan bendahara.

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bumdes ?

   Luar biasa antusias karena kenapa tidak antusias ini kan memang membantu masyarakat.

6. Bagaimana bentuk kerjasama Bumdes desa Soki dengan Bumdes desa lain

   Memang rencananya dalam programnya karena kami dari lima desa kabupaten Bima kemarin melakukan saling memberi masukan terhadap Bumdes-Bumdes yang lain. Apabila misalnya seperti teman saya anggota Bumdes yang selalu kontak dengan saya di desa Soro Sape mereka disana Bumdes sistem pengelolahannya pasar tradisional kemudian penangkal bawang dan sebagainya. Kita sering dengan Bumdes yang ada di Soki cocok sekali karena disini juga adalah petani bawang mungkin bisa kita mendapatkan keuntungan yang lebih bagus ketika kita bisa melakukan kerjasama dengan Bumdes di Soro misalnya karena bawang yang hasil petani di desa Soki kita giring ke Bumdes Soro yang jenis kerjanya penyangkal bawang tapi ini baru rencana nah kalau saya misalnya yang masih pengurus Bumdes pada hari ini saya akan melakukan itu salah-satu program saya.

7. Apakah ada aset Bumdes di desa Soki ?

   Belum pengadaan seperti itu baru di simpan pinjam (SPP) sekretarisnya kan langsung di desa kadang dirumah karena calon sekarang ini. Kalau sekarang inilah model pertanyaan ini yang akan direalisasikan 2016 kalau kita dulu itu kita lakukan secara sederhana karena masa percobaan Bumdes sehingga sistem pengelolaan juga kita sehingga tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang di ada perdes makanya anggota terpilih sekarang harus mempelajari Perdes kemudian harus mampu mempelajari anggaran AD/ART.

8. Bagaimana implementasi dengan adanya kegiatan Bumdesa ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Implementasikan yang dilakukan oleh pengurus untuk kemiskinan dengan memberikan pinjaman itu ketika pinjaman itu mendapatka kendala kita berikan keringanan jadi tidak terlalu di tekan dalam pengembalian sesuai jangka waktu yang ditentukan ketika musim pertama mereka gagal misalnya mungkin bisa diperbaiki dimusim kedua dan seterusnya. Kita membantu kemiskinan dan merealisasikan Bumdes dan berikan keringanan.

9. Bagaimana kendala masyarakat dalam pengembalian uang ?
   Kendala paling besar yang kami di SPP ini hadapi adalah Kendala asumsi masyarakat ketika kita berikan uang pinjaman yang tidak berasal dari siapa yang jelasnya mandek, macet yang anggapannya adalah uang pemerintah.

Bendahara Bumdes di desa Lido

(Nurbaya masa jabatan 2017-2020)

1. Kapan aktif Bumdes di desa Soki ?
   Bumdes Lido 2017 bulan 5
2. Apakah ada anggaran dana ?
   Ada anggaran dari ADD 50.000.000 cair pada tanggal 24 bulan 5
3. Apa saja program Bumdes di desa Lido ?
   Simpan pinjam (SPP) dengan bunga 20% yang sedang berjalan hanya simpan pinjam selesai sampai bulan 3 2018
4. Apa saja kendala yang dihadapi anggota Bumdes dalamkan progran Bumdes ?
   Macet, dari masyarakat sebagian ada yang bayar dan sebagian ada yang gk
5. Mulai kepengurusan ?
   2017 bulan 4 sampai 2020 cair anggaran bulan 5
6. Pemilihan kepengursan Bumdes ?
   Melalui musyawarah
7. Apakah ada bentuk kerjasama Bumdes
   Gk ada kerjasama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Adakah rencana tambahan program ?

   Ada ingin jualan obat-obatan

9. Bagaimana kendala dari masyarakat ?

   Tidak ada selain pembayaran simpan pinjam kira-kira yang macet 60%

10. Apa alasan masyarakat yang tidak mengembalikan uang pinjaman ?

    Ingin mengembalikan permusim terus karena tidak ada hasil panen tidak ada kesempatan untuk hasil kedua.

Staf di desa Soki Penaganti Bendahara Bumdes

(Rohana S.E Pengalihan tanggung jawab Bumdes desa Soki)

1. Kapan aktif Bumdes di desa Soki ?

   Aktif tahun Bumdes sebenar Bumdes sudah lama tapikan beberapa tahun gk jalan mulai dari 2014 baru mulai jalan sehingga mendapatkan modal bantuan dari propinsi 30% dari hadiah lomba desa 30.000.000 juta. Berdirinya Bumdes 2013, kan Bumdes berdiri dulu baru mendapatkan bantuan. 2015 penambahan dari APBDES 30.000.000 juta dari APBDES/ADD 30% terus 2016 25.000.000 juta dari ADD terus 2017 40.000.000 juta terus ada penambahan modal dari propinsi 100.000.000 juta.

2. Apa saja program dan kegiatan Bumdes di desa Soki ?

   Program Bumdes yang pertama berputarnya simpan pinjam sistem simpan pinjam tapi untuk tahun 2017 ini kita alihkan ke obat-obatan bakulan kita drop barang diserahkan ke masyarakat kalau sistem Bumdeskan namakan Badan Usaha Milik Desa bukan masyarakat yang mengajukan tapi dari desa serahkan ke pengurusnya, pengurus lalu menyalurkan ke masyarakat itu sistemnya beda dengan program PNPM. Kalau PNPM itu masyarakat yang mengajukan ke unitnya tapi beda dengan Bumdes kan langsung menyalurkan saja.

3. Apa saja kendala yang hadapi anggota dalam menjalankan kegiatan Bumdes ?

   Untuk sementara ini, ada seh kendalanya gk terlalu macet karena 1 bulan ini macetnya dengan kondisi alam ini seperti bawang. Alhamdulillah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lancar banyak perkembangannya kan sistemnya tri wulan dia bayar per hasil dan tidak per bulan dia bayar karena itu betul-betul milik desa milik masyarakat makanya gk seenaknya kita tergantung dari kesepakatan masyarakat tergantung keinginan masyarakat.

4. Kendala dari anggota sendiri ?

   Tidak ada cuman kendala terlambat untuk pembayarannya saja untuk akhir ini saja hanya beberapa orang kalau terlambat pembayaran kita kasih kesempatan sesuai dengan perjanjian mereka rapat itu mereka sendiri yang menentukan yang nama uang masyarakat kembali ke masyarakat tergantung kesepakatan kita terima seperti ini kita kembali lagi ke mereka yang menyepakatinya.

5. Apakah ada kerjasama antar desa khususnya mengenai Bumdes ?

   Belum ada saat ini baru direncanakan belum ada kerjasama.

6. Bagaiaman pemilihan struktur anggota Bumdes di desa Soki ?

   Kalau itu dari desa dulu membentuk panitia baru pemilihan lewat masyarakat untuk sementara ini masih pengurus lama baru pembentukan panitia kemarin tapi sampai sekarang belum ada pemelihan. Untuk sementara ini Bumdes yang paling aktif adalah desa Soki. Kalau yang mendapat bantuan dari kabupaten hanya desa Ndiha dan desa Lido.

7. Apakah ada program lain selain simpan pinjam ?

   Belum ada.

8. Apakah ada berkas terkait masa aktif Bumdes, administrasi, SK kepengurusan Bumdes ?

   Ada kalau secara laporan yang dikirim ke kabupaten belum ada memang karena sampai saat ini karena belum ada laporan saat ini tapi untuk tahun depan harus ada laporan lewat kabupaten ada juga adminitrasi pengembalian ada semua.

9. Siapakah pemegang tanggung jawab Bumdes sekarang ?

   Iya untuk sementara memang saya yang pegang kendali karena semua administrasi saya pegang semua yang tahu administrasinya cuman saya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sementara mereka gk tahu administrasinya sehingga saya yang pegang kendali makanya saya pegang semua.

10. Apakah benadara Bumdes tahu tentang keuanganya ?

    Apalagi bendahara Bumdes tidak tahu menau mereka hanya numpang nama kalau tahu administrasi cuman saya mereka hanya tahu tentang pengembalian.

11. Berapa masa jabatan pengurus Bumdes ?

    3 tahun berdasarkan perdes yang menentukan itu perdes Peraturan Bumdes, AD/ART semua itukan berdasarkan perdes. Hasil musyawarah, hasil musyawaarah dituangkan ke perdes kembali lagi ke masyarakat.

12. Bagaimana kendala simpan pinjam dari masyarakat ?

    Iya uang masyarakat kalau dianggap uang pemerintah masyarakat tidak akan kembali kalau mereka menganggap seperti itu maka macet selama ini mereka menganggap uang pemerintahkan kalau mereka sadar diri anggap uangnya sendiri akan dikembalikan kalau untuk bunganya 2% 1,5% untuk penambahan modal 0,5% untuk pengurus.

13. Apakah ada program tambahan Bumdes 2018 ?

    Ada rencana dana 100.000.000 rencana obat-obatan

14. Apakah ada sosialisasi khusus terkait dengan pelaksanaan program kegiatan BUMDes ?

    Belum ada sosialisasi khusus untuk pelaksanaan kegiatan program BUMDes tapi ada musyawarah segala pelaksanaan tentang peraturan desa mengenai pelaksanaan BUMDes maupun mengenai kepengurusan BUMDes.

Kepala Desa Soki Abas Muhamad

1. Kapan berdiri Bumdes tahun berapa ?

   Tahun 2013 langsung dengan penyertaan modal Rp. 10.000.000 juta lalu ditahun 2014 kita mengikuti lomba dikabupaten Bima dapat juara 2 di tingkat desa sehingga kita dana bantuan di tingkat propinsi Rp. 100.000.000 juta sehingga di dalam 100.000.000 juta untuk modal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bumdes lagi 30.000.000 juta 30.000.000 lagi tahun 2014 masuk di tahun 2015 lagi kita memberi dana juga 30.000.000 juta dari dana desa terus masuk 2016 memberikan dana Bumdes 25.000.000 terus di tahun 2017 40.000.000 terus kemarin juga hasil musyaarah di desa bahwa kita juga menetapkan pada tahun 2018 untuk anggaran 2018 masih di rencanakan sudah di tetapkan.

2. Kenapa Bumdes di kecamatan Belo itu hanya ada di desa Soki apakah yang melatar belakangi atau ada usulan individu atau kelompok ?

   Bukan per kelompok atau individu berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang ada di desa sendiri tapikan di tahun 2013-2015 Bumdes itu belum memiliki perdes tentang Bumdes Peraturan Desa artinya kita masih memakai aturan-aturan yang dibuat di tingkat desa saja. Jadi setelah lahirnya undang-undang tentang desa ini di perlakukan wajid itu sifatnya untuk Bumdes itu wajib harus ada perdesnya mulai tahun 2016 sehingga kita melakukan acuan perdes pada saat kita raker kamerin tentang Bumdes itu. Akhirnya memusyaarakan dengan seluruh yang ada di desa dan seluruh yang ada di lembaga desa kaitan masalah desa dan peraturan desa artinya yang menyangkut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (ADRT) itu berdasarkan musyawarah atau rapat daripada pemerintah desa dan lembaga desa sebagai perwakilan masyarakat desa.

3. Apakah ada Perdes (Petaruran Desa) tentang Bumdes di Bima ?

   Tidak ada undang-undang tersendiri cuman di sana itu pemerintah desa ada keputusan Kepala Desa, keputusan Kepala Desa terkaitannya dengan masalah Bumdes kalau terkait dengan undang-undang Bumdesnya yaitu perdesnya adalah buat di jadikan pemerintah desa lembaga desa yang di desa perwakilan masyarakat. Kaitannya masalah keuangannya bentuk pengelolaan simpan pinjam jadi tata cara pengelolaan keuangan Bumdes berdasarkan aturan-aturan main yang telah di buatkan bersama-sama di musyawarah desa artinya belum peres saat itu hanya aturan-aturan belum perdes.

4. Selain program simpan pinjam tidak program lain ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi pada saat itu anggaran di kelola dengan cara simpan pinjam masuk di anggaran 2016-2017 kita alihkan pengelolaannya yaitu melakukan perdangan obat-obatan bawang untuk kebutuhan masyarakat karena di desa kami adalah 100% memerlukan obat-obatan yang sangat membutuhkan obat-obatan sehingga kami akan alihkan pengelolaan itu kepada perdangan obat-obatan. Program 2013-2015 simpan pinjam 100% masuk tahun 2016-2017 walaupun ada simpan pinjam itu hanya ada ± 15% saja kita siapkan dana/anggaran simpan pinjam kita lebih fokus perdangan obat dengan cara melakukan perdangan obat sehingga kita mampu meningkatkan anggaran daripada Bumdes itu artinya itu adalah salah-satu cara untuk mempercepat proses dan kenapa kita alihkan ke perdangan obat karena simpan pinjam itu pertama banyak juga masyarakat itu yang mengatakan bahwa uang simpan pinjam itu uang pemerintah mau kita kembalikan oke mau kita tidak kembali oke berpedoman padahal itu perdangan obat itu jadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana Bumdes itu tidak berdasarkan apa yang menjadi keinginan daripada kepengurusan Bumdes tidak itu semua berdasarkan peraturan desa yang telah kita buat bersama dengan lembaga desa itu karena di dalam perdes itu mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepengurusan sampai dengan terpilih terakhir sampai dengan pelaksanaanya itu sudah tercantum semua di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) Bumdes itu termasuk prosentasi gaji di dalam pengelolaan pengurus semua tercantum artinya tidak semuanya untuk megelola anggara itu tidak ketika dia melakukan pengelolaan anggarannya itu di laur daripada itu maka kepengurusan itu dia akan bertanggung jawab secara hukum secara administrasi .

5. Apa saja kendala Bumdes saat ini ?

   Sampai sekarang belum ada kendala cuman begini untuk anggaran 2016-2017 hanya saja kita belum memberikan bantuan kepada kepengurusan karena kita punya rencana inginkan melakukan pemilihan ulang kepengurusan itu karena sudah berakhirnya masa jabatan itu sehingga kita

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai Kepala Desa itu akan tahan dulu sebentar yang nanti kepengurusan baru terpilih yang nanti ketika ke pengurusan yang baru sudah di lantik kita akan di serahkan di hadapan masyarakat banyak lalu sekaligus bukan saja uang yang serahkan ke pengurus terpilih nanti terutama tentang perdes tentang Bumdes itu.

Terutama memang ada Bumdes tiap desa itu tapi banyak pengeluaran yang tidak jelas, yang kedua memang masih ada beberapa desa yang memiliki Bumdes. Bahkan sudah ada desa di antara desa Soki yang terus melakukan pemilihan pembahasan Bumdes tapi dengan lalu memenuhi syarat lalu kita dapat bantuan dari propinsi lalu kenapa kita mendapat karena terkait dengan masalah karena memenuhi syarat sesuai yang di tentukan oleh Badan Perekonomian Propinsi karena melakukan survey di lapangan seperti apa Bumdes ini tingkat kemajuan dan kemunduranya sehingga dapat undangan untuk hadir raker tingkat di propinsi selama dua kali di tahun 2016 awal 2017 lagi saya utus ketua Bumdes itu untuk raker juga, alhamdulillah bulan sepuluh 2017 kita dapat bantuan 100.000.000 yang di serahkan oleh Bupati Bima. Yang jelas di Ngali belum ada sama sekali Bumdesnya pasti belum ada sama sekali, kan kita tiga hari rapat terkait tentang Bumdes itu kalau yang di kabupaten Bima inikan yang mewakili hanya tiga desa desa Soki, desa Leu kecamatan Bolo, desa Sari kecamatan Sape kalau Bumdes yang paling maju di kabupaten Bima ini di desa Sari kecamatan Sape yang paling maju dan tingkat pengelolaan sudah luar biasa kalau kita ini masih dalam tahap perencanaan dan inysa allah di tahun 2018 laksanakan ini dalam hal pengelolaan LDKK juga di Bumdesdesa sebagai lalu kita juga sekarang sedangpengelolaan air bersih jadi kita tetap beruhasa meter akan kita serahkan juga ke Bumdes air bersih ketika air bersih juga di kelola oleh Bumdes lumayan anggaran tidak usah banyak per satu orang 500.00 saja 500 kepala keluarga per bulan itu sudah berapa 5X5 25 20.000 saja berarti dalam satu bulan dalam satu tahun kita mendapatkan anggaran kurang lebih dari 600 ribu belum anggaran 6.000.000 satu tahun itu untuk air bersih selama ini kita beri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rokemendasiuntuk mengelolanya setelah terbentuknya Bumdes yang memiliki peraturan desa ini pihak desa akan menyerahkan kepada Bumdes LDKK artinya menjual pupuk itu kita dapat 200 per satu sak kali berapapuluhan ribu per satu angkut kedua banyak sekali uangnya Bumdes tergantung bagaimana tata kelolanya. setelah terbentuknya perdesnya saya akan menyerahkan kepada pengurus Bumdes.

6. Apakah ada kendala dari masyarakat dalam kegiatan Bumdes

   Ketika kita memberikan kepada masyarakat pengelolaan air bersih dengan ada Bumdes setelah kita bentuk memliki perdes ini kenapa tidak karena Bumdes ini adalah milik desa berarti yang dimiliki oleh desa soki pada umumnya pokonya yang paling maju di kabupaten Bima ini adalah desa Sari kalau di NTB desa Terara di Lombok Timur sudah lebih lima milyar pokoknya kita akan melakukan study banding punya rencana study banding kenapa kira-kita Bumdes mereka itu mendapat anggaran 5 milyar.

7. Bagaimana kerjasama pengurus BUMDes dengan pemerintah desa

   Dari mulai terbentuk BUMDes koordinasi antar pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa dan masyarakat masih lancar, walau ada beberapa mis komunikasi tapi masih teratasi hingga mampu menciptakan komunikasi lebih efektif antar Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes. Cuman hanya saya harus rutin melihatnya semua pengelolaannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 6 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Sumber: Nofiratullah, wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abas Muhamad. Minggu, 30 Desember 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sumber: Nofiratulah, wawancara dengan warga peminjan dana BUMDes (SPP) Ibu Aminah. Selasa, 25 Desember 2017.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan desa Soki, 24 Desember 2017.

Kondisi rumah peminjan dana BUMDes (SPP) saat meakukan wawancara di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 7 Biodata

BIODATA MAHASISWA

Nama : Nofiratullah

NIM : 14130051

Tempat, tanggal lahir : Ngali, 16 Juni 1995

Fak/Jur/Prog.Studi : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan IPS

Tahun Masuk : 2014

Alamat Rumah : Desa Ngali RT 07 RW 03 Kecamatan Belo Kabupaten Bima

No Tlp Rumah/HP : 085205083357

Alamat email : firaratullah@gmail.com

Malang, 21 Mei 2018

Mahasiswa

Nofiratullah

NIM. 14130051

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG